

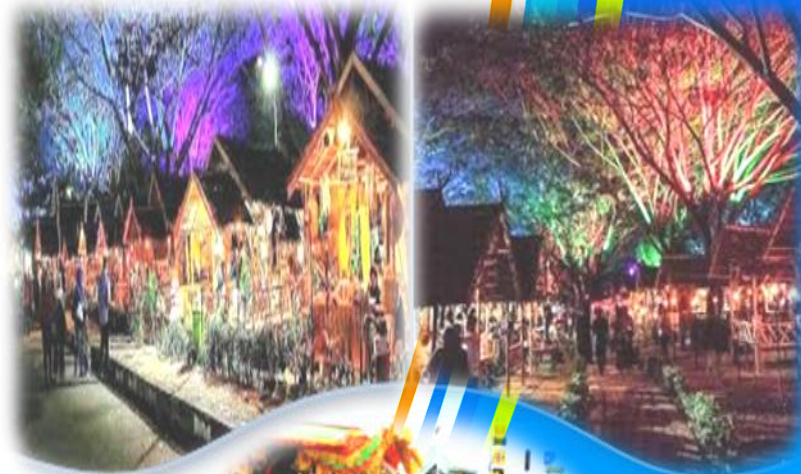


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

## PEMERINTAH (LAKIP)

# KOTA PALU

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KOTA PALU**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif laporan kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Palu.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Government* dan *Clean Government*. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Palu,           Maret 2018

Wali Kota Palu,

  
Drs. Hidayat, M.Si

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil capaian kinerja atas penyajian laporan kinerja Pemerintah Kota Palu yang telah berorientasi hasil (*outcome*).

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021. Tahun 2017 Pemerintah Kota Palu menetapkan 15 sasaran strategis dan 39 Indikator sasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 24/Bappeda/I/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- Misi I (satu) terdapat 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja:
  - ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator Kinerja dengan rata-rata capaian Tahun 2017 kategori sangat berhasil.
- Misi II (dua) terdapat 3 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja:
  - ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 11 indikator Kinerja dengan rata-rata capaian Tahun 2017 kategori sangat berhasil.
- Misi III (tiga) terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja:
  - ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator Kinerja dengan rata-rata capaian Tahun 2017 kategori Sangat berhasil.
- Misi IV (empat) terdapat 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja:
  - ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator Kinerja dengan rata-rata capaian Tahun 2017 kategori sangat Berhasil.
- Misi V (lima) terdapat 5 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja.

- ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 17 indikator Kinerja dengan rata-rata capaian Tahun 2017 kategori sangat berhasil.
- Misi VI (enam)terdapat 1 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja.
  - ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator Kinerja dengan rata-rata capaian Tahun 2017 kategori sangat berhasil.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil Analisis pencapaian indikator sasaran Terhadap pencapaian target indikator kinerja terhadap 15 sasaran yang mencakup 39 indikator kinerja dikategorikan sangat berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 105 % atau berkategori Sangat Berhasil. Dengan demikian realisasi capaian kinerja Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 dikategorikan Sangat Berhasil.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>ix</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2. Gambaran Umum Kota Palu .....  | 3          |
| 1.3. Organisasi Kota Palu .....   | 9          |
| 1.4. Permasalahan Umum dan Isu Pemerintah<br>Kota Palu .....  | 11         |
| <b>BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>   | <b>15</b>  |
| 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....  | 15         |
| 2.2. Perjanjian Kinerja .....   | 17         |
| <b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>   | <b>20</b>  |
| 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu.....  | 20         |
| 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis.....  | 23         |
| 3.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis.....  | 25         |
| 3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan<br>Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017....  | 40         |
| 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan<br>Tahun 2017 dengan Target RPJMD Tahun 2017..... | 42         |
| 3.6. Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi<br>dan Capaian Kinerja Serta Solusinya.....        | 46         |
| 3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber<br>Daya.....  | 46         |
| 3.8. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu<br>Tahun 2017 .....                                | 49         |
| 3.9. Pendapatan .....   | 50         |
| 3.10. Belanja daerah .....  | 51         |
| 3.11. Pembiayaan .....  | 52         |
| <b>BAB IV     PENUTUP.....</b>  | <b>54</b>  |

### LAMPIRAN :

1. Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Palu.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2017.
5. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2018.

## 6. Penghargaan Pemerintah Kota Palu

- Pemberian Opini WTP Tahun 2017 Oleh BPK Perwakilan Sulteng
- Penghargaan Kota Sadar HAM tahun 2017 oleh Kemenkumham Palu ditetapkan sebagai 10 kota dengan nilai indeks toleransi tertinggi (dengan nilai 5,80 dari skala 1-7)
- Penghargaan Anugrah pangripta Nusantara Tahun 2017 Oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 26 April 2017
- Penghargaan Status Akreditasi dengan hasil Kelulusan Tingkat Paripurna berdasarkan nomor sertifikat KARS-SERT/987/I/2018 tanggal 8 Januari 2018
- Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan”
- Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2016 Oleh Kementerian Keuangan RI
- Penghargaan Walikota Inspirator Oleh Kementerian Dalam Negeri RI
- Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2017 Oleh Indonesian Institute For Publik Governance

## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1  | Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah.....   | 2  |
| Tabel 1.2  | Evaluasi Pendapatan Tahun 2016-20221 .....  | 2  |
| Tabel 1.3  | Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2016...  | 4  |
| Tabel 1.4  | Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota<br>Kecamatan dan Jarak Ibu Kota kecamatan dengan Ibu<br>Kota Palu Tahun 2016..... | 4  |
| Tabel 1.5  | Letak Kecamatan menurut Posisi Pantai di Kota Palu<br>Tahun 2016 .....  | 6  |
| Tabel 1.6  | Ketinggian Kelurahan dari Permukaan laut Menurut<br>Kecamatan di Kota palu Tahun 2016 .....                                       | 7  |
| Tabel 1.7  | Nama Sungai yang mengalir di Kota Palu menurut<br>Kecamatan .....   | 8  |
| Tabel 1.8  | Keadaan Iklim rata-rata Kota Palu Tahun 2011-2015 .....   | 9  |
| Tabel 2.1  | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....  | 15 |
| Tabel 2.2  | Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu<br>Tahun 2017 .....  | 17 |
| Tabel 3.1  | Capaian IKU Tahun 2017.....   | 20 |
| Tabel 3.2  | Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017.....   | 23 |
| Tabel 3.3  | Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Sistem Informasi<br>Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS.....                         | 26 |
| Tabel 3.4  | Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Data dan<br>Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu.....                                     | 26 |
| Tabel 3.5  | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pendidikan<br>Dasar Bagi Usia Wajib Belajar 9 Tahun .....                                   | 27 |
| Tabel 3.6  | Capaian Sasaran Strategis Terlaksananya Peningkatan<br>Pendidikan Agama dan Budaya .....  | 28 |
| Tabel 3.7  | Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas<br>Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat .....                                     | 30 |
| Tabel 3.8  | Capaian Sasaran Strategis Penguatan Sumberdaya<br>Manusia;Penguatan IKM:Pengembangan IKM;Perbaikan<br>Produksi.....               | 31 |
| Tabel 3.9  | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan<br>Usaha Mikro.....  | 32 |
| Tabel 3.10 | Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Norma, Standar,<br>Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis Budaya.....                        | 32 |
| Tabel 3.11 | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Program, Kegiatan,<br>dan Anggaran yang Transparan, Akuntabel dan responsive....            | 33 |
| Tabel 3.12 | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan<br>Transportasi yang Aman dan Nyaman .....   | 34 |
| Tabel 3.13 | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan<br>Dekorasi Kota Yang Tertib, Indah dan Memiliki Nilai Budaya...                   | 35 |
| Tabel 3.14 | Capaian Sasaran Strategis Stategis Terwujudnya Ruang<br>Publik Kota yang Berbasis Nilai Budaya.....                               | 36 |
| Tabel 3.15 | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan<br>Kebersihan dan Keindahan Kota Yang Partisipatif .....                        | 36 |
| Tabel 3.16 | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pusat-pusat   |    |



|            |   |    |
|------------|---|----|
|            | Wisata Berbasis Budaya dan Religi.....  | 38 |
| Tabel 3.17 | Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Nilai-nilai Toleransi, Kekeluargaan dan Kegotong-royongan dalam Menjaga Keserasian Sosia..... | 39 |
| Tabel 3.18 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 .....                             | 40 |
| Tabel 3.19 | Perbandingan Target Kinerja Dalam RPJMD 2016-2021 .....   | 42 |
| Tabel 3.20 | Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2017 .....                                  | 47 |
| Tabel 3.21 | Realisasi pendapatan daerah Kota Palu tahun 2017 Per 31 Desember 2017 .....   | 51 |
| Tabel 3.22 | Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 .....   | 52 |
| Tabel 3.23 | Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 ....   | 53 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Gambar 1.1 | Peta Administrasi Wilayah Kota Palu .....  | 5 |
| Gambar 1.2 | Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu ..... | 7 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahunan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palu berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 telah dilakukan dengan pembahasan rancangan awal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan tentang Persetujuan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pertimbangan sebagai berikut :

### 1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah

Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah**

| No | Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD                                      | Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD   |
|----|---|--|
| 1  | Dinas Informatika dan Statistik   | Dinas Komunikasi dan Informatika   |
| 2  | Dinas Pendidikan  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |
| 3  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| 4  | Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   |
| 5  | Dinas Sosial dan PM   | Dinas Sosial   |
| 6  | BKD   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu                  |
| 7  | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 8  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   | Dinas Pariwisata   |

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Palu, Tahun 2018

## 2. Penyesuaian Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi terhadap pendapatan daerah Kota Palu Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Evaluasi Pendapatan Tahun 2016-2021**

| Tahun | Proyeksi dalam RPJMD | Realisasi/Proyeksi    | Deviasi |
|-------|----------------------|-----------------------|---------|
| 2016  | 1.430.046.760.971    | 1.444.152.214.772,63  | 0,99%   |
| 2017  | 1.660.515.499.642    | 1.340.906.455.717,20  | -19,25% |
| 2018  | 1.890.532.675.067    | 1.311.034.004.626,00  | -30,65% |
| 2019  | 2.171.870.463.530    | 1.342.070.129.259,12* |         |
| 2020  | 2.478.683.872.987    | 1.365.204.087.574,75* |         |
| 2021  | 2.757.139.020.504    | 1.391.772.235.730,51* |         |
|       |                      | Rata-rata             | -16,30% |

\* : Proyeksi pendapatan perubahan RPJMD

Sumber : Bappeda Kota Palu, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan deviasi yang begitu jauh. Proyeksi dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, masing-masing sebesar 0,99 % pada Tahun 2016, -19,25% pada Tahun 2017, dan -30,65% pada Tahun 2018. Rata-rata deviasi selama 3 tahun dari Tahun 2016-2018 sebesar -16,30%. Data evaluasi pada tabel di atas menunjukkan penetapan proyeksi pendapatan Tahun 2019-2021 tidak rasional dan realistis untuk dicapai, sehingga perlu penyesuaian dengan data realisasi/proyeksi.

### 3. Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan serta Program

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program yang tercantum pada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa indikator sasaran belum *Specific* (spesifik), *Measureable* (Terukur), *Attainable* (Dapat dicapai), *Result Oriented* (Orientasi Tujuan), *Time Bound* (Batasan Waktu), dan *Continuos Improve* (Perbaikan Berkelanjutan). Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengukur kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kota Palu.

### 4. Perubahan Sistematika Penyusunan RPJMD

Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menyesuaikan dengan sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan RPJMD dari semula sebanyak 10 bab menjadi 9 bab.

## 1.2. Gambaran Umum Kota Palu

### 1.2.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km<sup>2</sup> (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km<sup>2</sup> (1,95%).

**Tabel 1.3**  
**Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2016**

| No.              | Kecamatan    | Luas (KM <sup>2</sup> ) | Persentase    |
|------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 1.               | Palu Barat   | 8,28                    | 2,10          |
| 2.               | Tatanga      | 14,95                   | 3,78          |
| 3.               | Ulujadi      | 40,25                   | 10,19         |
| 4.               | Palu Selatan | 27,38                   | 6,93          |
| 5.               | Palu Timur   | 7,71                    | 1,95          |
| 6.               | Mantikulore  | 206,8                   | 52,35         |
| 7.               | Palu Utara   | 29,94                   | 7,58          |
| 8.               | Tawaeli      | 59,75                   | 15,12         |
| <b>Kota Palu</b> |              | <b>395,06</b>           | <b>100,00</b> |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan diuraikan dalam tabel 2.1, sementara jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Kota Palu diuraikan dalam tabel 2.2.

**Tabel 1.4**  
**Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2016**

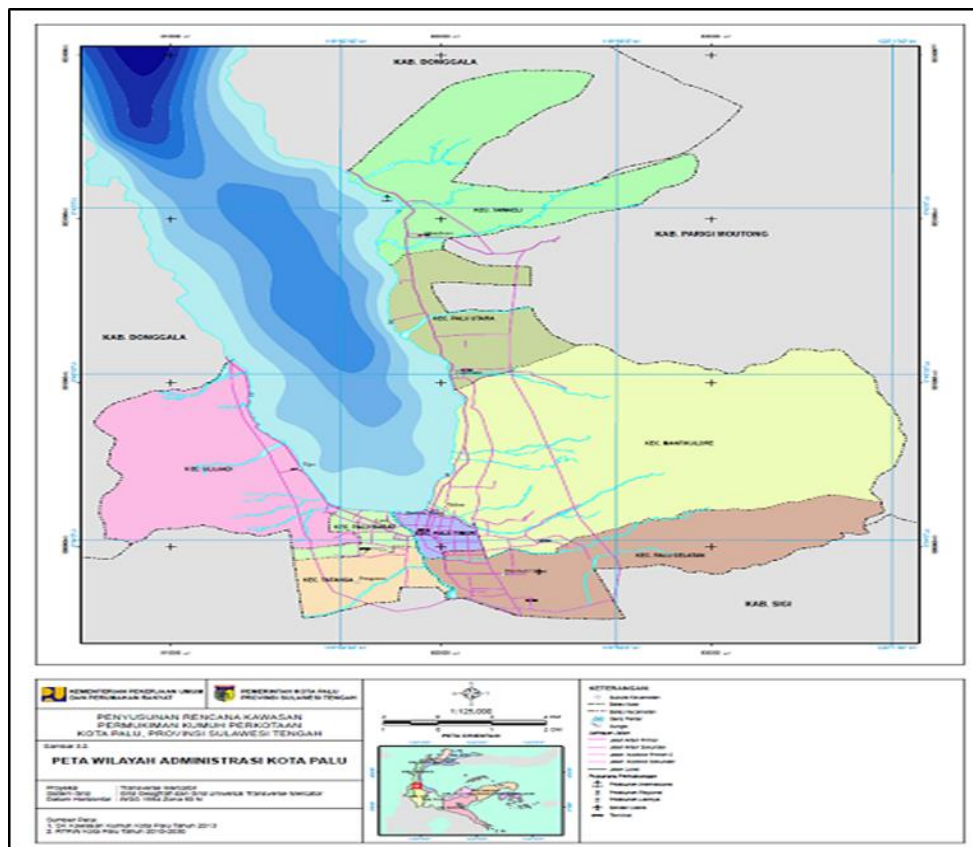
| No.           | Kecamatan    | Banyaknya Kelurahan | Ibu Kota       | Jarak Melalui Darat (KM) |
|---------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 1.            | Palu Barat   | 6                   | Lere           | 4                        |
| 2.            | Tatanga      | 6                   | Pengawu        | 6                        |
| 3.            | Ulujadi      | 6                   | Tipo           | 9                        |
| 4.            | Palu Selatan | 5                   | Birobuli Utara | 2                        |
| 5.            | Palu Timur   | 5                   | Besusu Barat   | 3                        |
| 6.            | Mantikulore  | 8                   | Talise         | 3                        |
| 7.            | Palu Utara   | 5                   | Mamboro        | 10                       |
| 8.            | Tawaeli      | 5                   | Lambara        | 17                       |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>46</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>                 |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Berdasarkan uraian pada tabel 2.2 kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah kelurahan sebanyak 8 (Delapan) kelurahan, sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli dengan jarak 17 Km.

### 1.2.2. Letak, Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Rencana Kawasan Pemukiman Tahun 2016

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kota Palu**

Kota Palu berada di sekitar Garis Khatulistiwa terdiri dari 46 (empat puluh enam) kelurahan. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu. Letak kecamatan Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam tabel 2.3.

**Tabel 1.5**  
**Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2016**

| No               | Kecamatan    | Jumlah Kelurahan | Letak     |              |
|------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|
|                  |              |                  | Pantai    | Bukan Pantai |
| 1                | Palu Barat   | 6                | 1         | 5            |
| 2                | Tatanga      | 6                | -         | 6            |
| 3                | Ulujadi      | 6                | 4         | 2            |
| 4                | Palu Selatan | 5                | -         | 5            |
| 5                | Palu Timur   | 5                | 1         | 4            |
| 6                | Mantikulore  | 8                | 3         | 5            |
| 7                | Palu Utara   | 5                | 4         | 1            |
| 8                | Tawaeli      | 5                | 4         | 1            |
| <b>Kota Palu</b> |              | <b>46</b>        | <b>17</b> | <b>29</b>    |

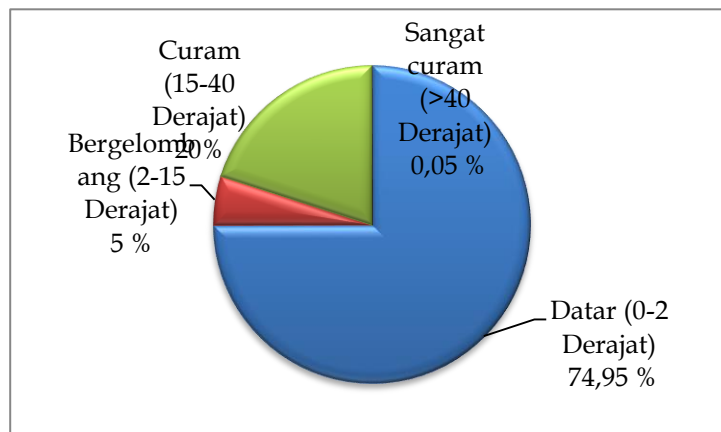
*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016*

Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah bukan pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli hampir semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 (empat) kelurahan yang berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 1 (satu) kelurahan yang berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

### **1.2.3. Kondisi Topografi**

Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota Palu ditunjukkan dalam Gambar 1.2 dan tabel 1.6. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase 75 % dari total luas wilayah. Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%. Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 20 %. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan > 40 derajat. Wilayah dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.





Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

**Gambar 1.2**  
**Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu**

**Tabel 1.6**  
**Ketinggian Kelurahan dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2016**

| No        | Kecamatan    | Jumlah Kelurahan | Ketinggian dari Permukaan Laut (M) |           |          |
|-----------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------|
|           |              |                  | <500                               | 500 – 700 | 700+     |
| 1         | Palu Barat   | 6                | 6                                  | -         | -        |
| 2         | Tatanga      | 6                | 6                                  | -         | -        |
| 3         | Ulujadi      | 6                | 6                                  | -         | -        |
| 4         | Palu Selatan | 5                | 4                                  | 1         | -        |
| 5         | Palu Timur   | 5                | 5                                  | -         | -        |
| 6         | Mantikulore  | 8                | 7                                  | 1         | -        |
| 7         | Palu Utara   | 5                | 5                                  | -         | -        |
| 8         | Tawaeli      | 5                | 5                                  | -         | -        |
| Kota Palu |              | <b>46</b>        | <b>44</b>                          | <b>2</b>  | <b>-</b> |

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) kelurahan di Kota Palu yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Kelurahan yang memiliki ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut sebanyak 2 (dua) kelurahan dan tidak terdapat kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut.

#### 1.2.4. Kondisi Geologi

Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (*Inncous Intrusiverocks*). Disamping pula batuan-batuan metamorfosis dan sedimen.

Dataran Lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran Lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang.

#### 1.2.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karekteristik yang spesifik, sehingga berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim. Kota Palu tidak dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai Non Zona Musim.

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.5 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

**Tabel 1.7**  
**Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu**  
**Menurut Kecamatan**

| No. | Kecamatan    | Nama Sungai  |
|-----|--------------|--|
| 1.  | Palu Barat   | Sungai Palu  |
| 2.  | Tatanga      | Sungai Lewara                                      |
| 3.  | Ulujadi      | Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo              |
| 4.  | Palu Selatan | Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.                  |
| 5.  | Palu Timur   | Sungai Palu, dan Sungai Pondo                      |
| 6.  | Mantikulore  | Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela |
| 7.  | Palu Utara   | Sungai Taipa dan Sungai Pajeko                     |
| 8.  | Tawaeli      | Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli               |

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2016

Kota Palu memiliki karakter klimatologi yang spesifik karena Kota Palu tidak dapat digolongkan daerah musim atau biasa disebut Non Zona Musim. Kondisi iklim Kota Palu dari tahun ketahun selama 5 tahun terakhir cukup stabil, namun pada Tahun 2016 sedikit mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan yang cukup besar terjadi pada perubahan curah hujan. Curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari rata-rata 71,8 mm pada Tahun 2011 menjadi rata-rata 41,06 pada Tahun 2015. Berikut ini gambaran keadaan iklim rata-rata Kota Palu menurut suhu, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin.

**Tabel 1.8**  
**Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2011-2015**

| Rata-rata                      | 2011    | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Suhu Udara (°C)</b>         | 27,60   | 27,70      | 27,70      | 27,28      | 28,37      |
| <b>Tekanan Udara (mb)</b>      | 1.009,9 | 1.010,3    | 1.010,2    | 1.011,1,   | 1.011,7    |
| <b>Kelembapan Udara (%)</b>    | 76,10   | 76,00      | 76,40      | 77,88      | 72,51      |
| <b>Penyinaran Matahari (%)</b> | 54,50   | 62,90      | 57,70      | 63,06      | 73,43      |
| <b>Curah Hujan (mm)</b>        | 71,98   | 63,38      | 62,33      | 58,76      | 41,06      |
| <b>Kecepatan Angin (knots)</b> | 3,00    | 3,80       | 3,60       | 3,83       | 4,53       |
| <b>Arah Angin Terbanyak</b>    | Utara   | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut |

*Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu*

Suhu udara di Kota Palu selama lima tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari rata-rata 27,6°C Pada Tahun 2011 menjadi 28,37°C pada Tahun 2015. Kelembaban udara mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata 76,1% menjadi 72,51% pada Tahun 2015. Kecepatan angin terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata 3,00 knots menjadi 4,53 knots pada Tahun 2015. Arah angin di Kota Palu selama lima tahun terakhir umumnya bertiup dari arah Barat Laut kecuali pada Tahun 2011 angin bertiup umumnya dari arah Utara.

### **1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu**

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun susunan Organisasi Pemerintah Kota Palu terdiri dari:

1. Walikota dan Wakil Walikota Palu;
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD;
4. Inspektorat Daerah;
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
  4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  10. Dinas Pemuda dan Olah raga;
  11. Dinas Pendidikan;
  12. Dinas Pekerjaan Umum;
  13. Dinas Perhubungan;
  14. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
  15. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  16. Dinas Lingkungan Hidup;
  17. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
  18. Dinas Informatika dan Statistik;
  19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota;
  20. Satuan Polisi Pamong Praja;
  21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Badan Daerah terdiri dari :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Badan Pendapatan Daerah;
  5. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  6. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura ;
  7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
  8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **1.4. Permasalahan Umum dan Isu Strategis Pemerintah Kota Palu**

### **1.4.1. Permasalahan Umum**

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan di Kota Palu, sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu**

Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

##### **a. Pendidikan**

- Mutu hasil ujian nasional rendah.
- Masih terdapat anak putus sekolah.

##### **b. Kesehatan**

- Angka harapan hidup Kota Palu mengalami penurunan.
- Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah.
- Kecukupan sarana kesehatan Puskesmas dan Pustu belum sesuai standar.
- Kurangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- Rendahnya akses sanitasi yang layak.

##### **c. Pekerjaan Umum**

- Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan memenuhi syarat.
- Banjir dan air yang tergenang di jalan karena tidak adanya saluran di sisi jalan mengarah ke bawah trotoar yang berlanjut ke drainase sekunder
- Sarana sosial dan hiburan masyarakat masih kurang dan tidak dikelola dengan baik.

##### **d. Penataan Ruang dan Pertanahan**

- Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.
- Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut kelurahan.
- Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggiran Kota Palu.
- Belum optimalnya pendataan pertanahan.

#### **2. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu**

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu sebagai berikut:

**a. Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.
- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah.
- Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- Masih kurangnya sampah yang dikelola oleh masyarakat.
- Kurangnya penghijauan di setiap pinggir jalan.
- Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik.
- Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, dan hewan.
- Belum optimalnya pengelolaan hutan kota.

**b. Perhubungan**

- Belum optimalnya pelaksanaan trayek angkutan umum dalam kota.
- Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang.

**c. Informatika**

- Belum semua akses informasi tersedia secara realtime.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam mencapai Good Governance.
- Masih kurangnya sumber daya manusia bidang teknologi informasi komunikasi yang handal dan profesional.

**d. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya lokal.
- Masih terdapat koperasi tidak aktif
- Belum adanya data dasar UMKM.

**e. Statistik**

- Belum terintegrasinya data seluruh OPD.
- Belum optimalnya sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan.
- Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral.
- Sumberdaya aparatur pengelola data masih sangat kurang.

**3. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan pemerintah Kota Palu.**

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu di antaranya teridentifikasi sebagai berikut :

#### **a. Kebudayaan dan Pariwisata**

- Kurang tersedianya prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata unggulan.
- Belum terkoordinasi dengan baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha.
- Belum adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Palu.
- Belum optimalnya peran organisasi, birokrasi, swasta, profesi, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- Kurangnya sumber daya manusia pariwisata.
- Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- Tidak terorganisirnya event seni, budaya dan pariwisata daerah.
- Belum dikembangkan ekonomi kreatif seni dan budaya.
- Belum tersedianya informasi sumber daya budaya yang akurat, terpercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat.
- Pengelolaan situs cagar budaya Kota Palu masih kurang.
- Belum optimalnya pembinaan pada sanggar seni.
- Mulai hilangnya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kota.
- Tidak berjalannya adat budaya yang berlaku di dalam masyarakat.

#### **b. Pertanian**

- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.
- Menurunnya produktivitas dan mutu hasil pertanian seperti tanaman padi, kelapa dalam dan ternak.

#### **c. Perdagangan dan Perindustrian**

- Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian semakin menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
- Belum tumbuhnya investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

### **4. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penunjang pemerintah Kota Palu.**

Permasalahan pembangunan daerah berkaitan urusan penunjang pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan**

- Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat.

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan Musrenbang.
- Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang.
- Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.
- Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan Oragnisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

**b. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

- Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah.

**1.4.2. Isu Strategis Pemerintah Kota Palu**

Berdasarkan permasalahan umum Pemerintah Kota Palu sesuai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dapat diuraikan beberapa isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah
2. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau
3. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Kemiskinan Kota
5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan
6. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah
7. Pengembangan Sistem Transportasi Umum
8. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Pemukiman Kota
10. Pembangunan Berbudaya Dan Beradat



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 – 2021. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  |           |
|----|---|--|-----------|
| 1  | 2   | 3  |           |
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS                      | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS                      |           |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu                                 | Jumlah dokumen data potensi SDM<br>Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS        |           |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun                                | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar   | SD<br>SMP |
|    |   | Angka Melek huruf  |           |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya                                       | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama                      |           |
|    |   | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni                         |           |
|    |   | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya                    |           |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat                                  | Angka usia harapan hidup   |           |
|    |   | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas   |           |
|    |   | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit   |           |
|    |   | Prevalensi balita gizi buruk   |           |
|    |   | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa  |           |
| 6  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  |           |
|    |   | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  |           |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                    | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      |           |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   |           |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif        | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. |           |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                                      | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   |           |
|    |   | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  |           |

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  |
|----|---|--|
|    |   | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya                                   | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                          |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya  | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro           |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif   | Persentase sampah yang terangkut   |
|    |   | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  |
|    |   | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan   | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                   |
|    |   | Panjang jalan yang terbangun (meter)   |
|    |   | Panjang drainase yang terbangun (meter)  |
|    |   | Persentase drainase kota dalam kondisi baik  |
|    |   | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                      |
|    |   | Akses Sanitasi layak   |
|    |   | Cakupan layanan pengguna air bersih  |
|    |   | Persentase kawasan kumuh yang tertata  |
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                 |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                                     |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi                           |
|    |   | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi                         |

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
- Misi 2 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 11 (sebelas) indikator kinerja
- Misi 3 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja
- Misi 4 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
- Misi 5 terdapat 5 (lima) sasaran, dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja
- Misi 6 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu  
Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target           |
|----|--|---|------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                |
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS   | 1                |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu            | Jumlah dokumen data potensi SDM                                     | 3 Dok            |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                        | 4 Dok            |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun           | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                        | SD<br>SMP        |
|    |  |   | 0,35 %<br>0,32 % |
|    |  | Angka Melek huruf   | 99,81 %          |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya                  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama   | 100 %            |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni      | 100 %            |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya | 100 %            |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat             | Angka usia harapan hidup  | 70,68 tahun      |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas                                | Baik             |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit :                            | Baik             |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk  | 0,66             |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa                       | 100%             |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif                                       | 91,30            |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target   |
|----|---|--|----------|
| 6  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk  |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 102      |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                    | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD   |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD    |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif        | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%      |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                                      | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek |
|    |   | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%   |
|    |   | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%      |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya             | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 1        |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya                                    | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 4        |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif                     | Persentase sampah yang terangkut   | 60%      |
|    |   | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton   |
|    |   | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan     | 15%      |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan                                     | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                       | 51,54%   |
|    |   | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 234.784  |
|    |   | Panjang drainase yang terbangun (meter)  | 42.104   |
|    |   | Persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 43,86%   |
|    |   | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 100%     |
|    |   | Akses Sanitasi layak   | 61,14%   |
|    |   | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,27%   |
|    |   | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 17,61%   |
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                     | 5 lokasi |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi             | 46     |
|    |  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi   | 2      |
|    |  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi | 17     |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu**

**3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017.**

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2017 di gambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Capaian IKU Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   |     | Tahun 2017 |           | Rumus   |
|----|--|---|-----|------------|-----------|---|
|    |  |   |     | Target     | Realisasi |   |
| 1  | 2  | 3   |     | 4          | 5         | 6   |
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS |     | 1          | 1         | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS   |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu            | Jumlah dokumen data potensi SDM                                   |     | 3 Dok      | 3 Dok     | Jumlah dokumen data potensi SDM   |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                      |     | 4 Dok      | 4 Dok     | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS  |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun           | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar                      | SD  | 0,35 %     | 0,04      | Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kota Palu dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kota Palu dikali 100 %                         |
|    |  |   | SMP | 0,32 %     | 0,01      | Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-Kota Palu dibagi jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kota Palu dikali 100 %                     |
|    |  | Angka Melek huruf   |     | 99,81 %    | 99,83 %   | Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun 2017 dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100 |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya                  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama |     | 100 %      | 100 %     | Jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama dibagi jumlah siswa kelas 5 se-Kota Palu dikali 100%              |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni    |     | 100 %      | 100 %     | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni dibagi jumlah Sekolah Menengah Pertama                               |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2017  |             | Rumus  |
|----|---|--|-------------|-------------|--|
|    |   |  | Target      | Realisasi   |  |
|    |   | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya                    | 100 %       | 100 %       | Jumlah sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya dibagi jumlah sekolah pendidikan dasar dikali 100% |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat                                  | Angka usia harapan hidup   | 70,68 tahun | 69,93 tahun | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur       |
|    |   | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas   | Baik        | Baik        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25  |
|    |   | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit   | Baik        | Baik        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25  |
|    |   | Prevalensi balita gizi buruk   | 0,66        | 0,153       | (Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100   |
|    |   | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa  | 100%        | 100%        | (Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100                        |
|    |   | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif  | 91,30       | 100%        | (Jumlah Kelurahan siaga yang aktif) dibagi (jumlah Kelurahan siaga) * 100  |
| 6  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk     | 22 Klpk     | Jumlah data kelompok IKM   |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 102         | 102         | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                    | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD      | 10 OPD      | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD                                  |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD       | 6 OPD       | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik terhadap layanan OPD   |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif        | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%         | 65%         | Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikali 100 %   |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                                      | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek    | 6 Trayek    | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan   |
|    |   | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%      | 82,77%      | Jumlah lokasi lahan parkir yang layak dibagi jumlah lahan parkir kota dikali 100%                                  |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2017 |           | Rumus  |
|----|---|--|------------|-----------|--|
|    |   |  | Target     | Realisasi |  |
|    |   | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%        | 50%       | Jumlah terminal kota yang terkelola dibagi jumlah terminal kota  |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                          | 1          | 1         | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah  |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya                        | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro           | 4          | 4         | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro   |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif         | Persentase sampah yang terangkut   | 60%        | 60%       | Jumlah sampah yang terangkut dibagi jumlah sampah yang ada dikali 100 %  |
|    |   | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton     | 15 ton    | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  |
|    |   | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan | 15%        | 15%       | Jumlah kelurahan yang menjaga kebersihan lingkungan dibagi jumlah kelurahan Kota Palu dikali 100 %               |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan                         | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                   | 51,54%     | 59,60%    | Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan Kota Palu dikali 100 %                                     |
|    |   | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 234.784    | 303.406   | Panjang jalan yang terbangun (meter)   |
|    |   | Panjang drainase yang terbangun (meter)  | 42.104     | 42.476    | panjang drainase yang terbangun (meter)  |
|    |   | Persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 43,86%     | 48,77%    | Panjang drainase terbangun dalam kondisi baik dibagi panjang drainase Kota Palu yang mesti terbangun dikali 100% |
|    |   | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                      | 100%       | 100%      | Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan yang terbangun dikali 100%                             |
|    |   | Akses sanitasi layak   | 61,14%     | 61,14%    | Akses sanitasi layak   |
|    |   | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,27%     | 81,55%    | Jumlah layanan pengguna air bersih dibagi jumlah penduduk dikali 100 %   |
|    |   | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 17,61%     | 17,61%    | Jumlah kawasan kumuh yang tertata dibagi jumlah kawasan kumuh di Kota Palu                                       |
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                 | 5 lokasi   | 5 lokasi  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)   |



| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2017 |           | Rumus  |
|----|---|--|------------|-----------|--|
|    |   |  | Target     | Realisasi |  |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi             | 46         | 46        | Jumlah lembaga adat yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga adat Kota Palu           |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi   | 2          | 2         | Jumlah lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga keagamaan Kota Palu |
|    |   | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi | 17         | 17        | Jumlah lembaga seni yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga seni Kota Palu           |

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

### 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| No | Skala nilai (%) | Kesimpulan evaluasi |
|----|-----------------|---------------------|
| 1  | 85 – 100        | Sangat Berhasil     |
| 2  | 70 – 85         | Berhasil            |
| 3  | 55 – 70         | Cukup Berhasil      |
| 4  | < 55            | Tidak Berhasil      |

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Tahun 2017 |           | Interval (%) |       |       |        |
|----|--|---|------------|-----------|--------------|-------|-------|--------|
|    |  |   | Target     | Realisasi | <55          | 55-70 | 70-85 | 85-100 |
| 1  | 2  | 3   | 4          | 5         | 6            | 7     | 8     | 9      |
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS | 1          | 1         |              |       |       | √      |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu            | Jumlah dokumen data potensi SDM                                   | 3 Dok      | 3 Dok     |              |       |       | √      |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                      | 4 Dok      | 4 Dok     |              |       |       | √      |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun           | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                      | SD         | 0,35 %    | 0,04         |       |       | √      |
|    |  |   | SMP        | 0,32 %    | 0,01         |       |       | √      |
|    |  | Angka Melek huruf   |            | 99,81 %   | 99,83 %      |       |       | √      |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Tahun 2017  |             | Interval (%) |       |       |        |
|----|--|--|-------------|-------------|--------------|-------|-------|--------|
|    |  |  | Target      | Realisasi   | <55          | 55-70 | 70-85 | 85-100 |
| 1  | 2  | 3  | 4           | 5           | 6            | 7     | 8     | 9      |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama                      | 100 %       | 100 %       |              |       |       | √      |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni                         | 100 %       | 100 %       |              |       |       | √      |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya                    | 100 %       | 100 %       |              |       |       | √      |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat   | Angka usia harapan hidup   | 70,68 tahun | 69,93 tahun |              |       |       | √      |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas   | Baik        | Baik        |              |       |       | √      |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit   | Baik        | Baik        |              |       |       | √      |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk   | 0,66        | 0,153       |              |       |       | √      |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa  | 100%        | 100%        |              |       |       | √      |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif  | 91,30       | 100%        |              |       |       | √      |
| 6  | 1. Penguatan sumber daya manusia;<br>2. Penguatan IKM;<br>3. Pengembangan IKM;<br>4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk     | 22 Klpk     |              |       |       | √      |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro   | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 102         | 50          |              |       |       | √      |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                                 | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD      | 10 OPD      |              |       |       | √      |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD       | 6 OPD       |              |       |       | √      |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif                     | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%         | 65%         |              |       |       | √      |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman   | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek    | 6 Trayek    |              |       |       | √      |
|    |  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%      | 82,77%      |              |       |       | √      |
|    |  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%         | 50%         |              |       |       | √      |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya                          | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 1           | 1           |              |       |       | √      |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya   | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 4           | 4           |              |       |       | √      |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2017 |           | Interval (%) |       |       |        |
|----|---|--|------------|-----------|--------------|-------|-------|--------|
|    |   |  | Target     | Realisasi | <55          | 55-70 | 70-85 | 85-100 |
| 1  | 2   | 3  | 4          | 5         | 6            | 7     | 8     | 9      |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif   | Persentase sampah yang terangkut   | 60%        | 60%       |              |       |       | √      |
|    |   | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton     | 15 ton    |              |       |       | √      |
|    |   | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan | 15%        | 15%       |              |       |       | √      |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan   | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                   | 51,54%     | 59,60%    |              |       |       | √      |
|    |   | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 234.784    | 303.406   |              |       |       | √      |
|    |   | Panjang drainase yang terbangun (meter)  | 42.104     | 42.476    |              |       |       | √      |
|    |   | Persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 43,86%     | 48,77%    |              |       |       | √      |
|    |   | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                      | 100%       | 100%      |              |       |       | √      |
|    |   | Akses Sanitasi layak   | 61,14%     | 61,14%    |              |       |       | √      |
|    |   | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,27%     | 81,55%    |              |       |       | √      |
|    |   | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 17,61%     | 17,61%    |              |       |       | √      |
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                 | 5 lokasi   | 5 lokasi  |              |       |       | √      |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                                     | 46         | 46        |              |       |       | √      |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi                           | 2          | 2         |              |       |       | √      |
|    |   | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi                         | 17         | 17        |              |       |       | √      |

Sumber data : BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

### 3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

#### Sasaran 1 :

#### “Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS”

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis tersedianya sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS, *indikator kinerja* jumlah sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS, angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS disebabkan tersedianya sumberdaya pengguna IT disetiap perangkat daerah dan kelurahan, terlaksananya integrasi sinkronisasi potensi sumberdaya

Kota Palu berbasis GIS, tersedianya desain dan software sistem potensi sumberdaya daerah Kota Palu. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS | 1      | 1         | 100 %     |

**Sasaran 2 :**

**” Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu “**

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 dengan sasaran strategis tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu, indikator kinerja jumlah dokumen data potensi SDM dengan angka capaian kinerja sarannya sebesar 100 % dan indikator kinerja jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS, angka capaian kinerja sarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu disebabkan terlaksananya survey dan pemetaan potensi sumberdaya daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dan tersedianya sarana dan prasarana sistem jaringan disetiap perangkat daerah dan kelurahan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu

| No | Indikator Kinerja                            | Target    | Realisasi | % Capaian |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah dokumen data potensi SDM              | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 %     |
| 2  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 %     |

**Sasaran 3 :**

**” Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun, indikator kinerja Angka Putus Sekolah tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar) dengan angka capaian kinerja sarannya

sebesar 85,71% dengan predikat **sangat berhasil** dan SMP sebesar 196,86% dengan predikat **sangat berhasil**.

Indikator kinerja Angka Melek Huruf dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,98% dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapaiannya sasaran strategis terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun pada indikator kinerja angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar tingkat SMP dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Kota Palu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 003/III/pemkot/2017 tentang Larangan Memungut Sumbangan Orang Tua Murid di Seluruh Sekolah Tingkat TK/Paud, SD, dan SMP. Dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan menuntaskan wajib belajar 9 Tahun.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun

| No | Indikator Kinerja                              | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar : |        |           |           |
|    | - SD   | 0,035  | 0,04      | 85,71%    |
|    | - SMP  | 0,32   | 0,01      | 196,86%   |
| 2  | Angka Melek huruf                              | 99,85  | 99,83     | 99,98%    |

**Sasaran 4 :**

**” Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya “**

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 dengan sasaran strategis terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya pada capaian indikator persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**.

Capaian indikator persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**. Sedangkan capaian indikator persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya dengan indikator persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama disebabkan adanya kebijakan pemerintah kota palu yang mewajibkan bagi siswa

kelas 5 SD untuk mengikuti pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) di luar jam sekolah pada tingkat sekolah dasar.

Tercapainya sasaran strategis persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni disebabkan telah terbentuknya sanggar seni diseluruh Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu.

Tercapainya sasaran strategis persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota Palu melalui Instruksi Wali Kota Palu Nomor 75/II/pemkot/2017 tentang Penggunaan Atribut Budaya di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**

Capaian Sasaran Strategis Terlaksananya Peningkatan Pendidikan Agama dan Budaya

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama   | 100%   | 100%      | 100%      |
| 2  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni      | 100%   | 100%      | 100%      |
| 3  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya | 75 %   | 75 %      | 100%      |

**Sasaran 5 :**

**” Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja angka usia harapan hidup, angka capaian kinerjanya sebesar 98,94 % dengan predikat **sangat berhasil**. Untuk indikator kinerja Indeks pelayanan kesehatan puskesmas, angka capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja Indeks pelayanan kesehatan rumah sakit, angka capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja prevalensi balita gizi buruk, angka capaian kinerjanya sebesar 176,82 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja persentase penanggulangan kejadian luar biasa, angka capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Indikator kinerja cakupan kelurahan siaga aktif, angka capaian kinerjanya sebesar 109,53 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja Indeks pelayanan kesehatan puskesmas disebabkan :

- Telah terciptanya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan dan memperbaiki kualitas mutu pelayanan di puskesmas
- Kualitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan yang meningkat, melalui pelatihan-pelatihan teknis kesehatan.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja indeks pelayanan kesehatan rumah sakit disebabkan :

- Adanya pembenahan pada unsur waktu tunggu pelayanan melalui perubahan dalam penerimaan pasien di loket pendaftaran dengan menyediakan fasilitas mesin antrian kunjungan.
- Adanya pemilahan pasien lama dan pasien baru dan pengaturan atau penjadwalan/pembagian tugas kerja dokter spesialis di pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- Adanya pembenahan pada unsur kenyamanan ruangan dan keamanan ruangan melalui pengawasan yang ketat dari petugas keamanan dalam pemberlakuan jam besuk dan penjaga pasien maksimal 2 orang, selain itu anak usia dibawah 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke ruang perawatan sehingga suasana tenang dan nyaman dapat dirasakan pasien

Sejalan dengan tercapainya indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Tahun 2017 RSUD Anutapura mendapatkan Pengakuan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit bahwa RSUD Anutapura Palu mendapatkan Status Akreditasi dengan hasil kelulusan TINGKAT PARIPURNA berdasarkan Nomor Sertifikat KARS-SERT/987//2018 tanggal 8 Januari 2018.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja prevalensi balita gizi buruk disebabkan adanya kepedulian Pemerintah Kota Palu dalam upaya penanganan balita gizi buruk di wilayah Kota Palu.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan balita gizi buruk di Kota Palu antara lain:

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk;
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan di Posyandu;
- Pemberian MP-ASI pada Balita Gakin usia (6– 12 bulan);
- Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk;
- Pendampingan keluarga Balita Kurang Gizi;
- *Teurapetic Feeding Center (TFC)*;
- *Community Feeding Center (CFC)*

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja persentase penanggulangan kejadian luar biasa disebabkan karena tidak adanya kasus penyakit yang berpotensi KLB dalam kurun waktu beberapa tahun. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan penanggulangan kelurahan yang mengalami KLB, meliputi:

- Pemantauan dan pelacakan KLB/Surveilans Epidemiologi;
- Pemantauan dan pelacakan Suspek KLB (Kejadian Luar Biasa);
- Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS);
- Pelaporan surveilans epidemiologi dan kematian;
- Penanggulangan bencana dan pasca bencana.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada indikator kinerja cakupan kelurahan siaga aktif disebabkan adanya peran serta aktif masyarakat Kota Palu dalam program kesehatan, hal ini terlihat dari jumlah poskesdes di Kota Palu Tahun 2017 adalah 52 unit, baik yang berasal dari swadaya masyarakat maupun yang dibangun oleh pemerintah, dengan jumlah kader sebanyak 102 orang dan tokoh masyarakat 52 orang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

| No | Indikator Kinerja                             | Target      | Realisasi   | % Capaian |
|----|---|-------------|-------------|-----------|
| 1  | Angka usia harapan hidup                      | 70,68 Tahun | 69,93 Tahun | 98,94%    |
| 2  | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas          | Baik        | Baik        | 100%      |
| 3  | Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit        | Baik        | Baik        | 100%      |
| 4  | Prevelensi balita gizi buruk                  | 0,66        | 0,153       | 176,82%   |
| 5  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa | 100%        | 100%        | 100%      |
| 6  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif                 | 91,30       | 100%        | 109,53%   |



**Sasaran 6 :**

**” Penguatan sumber daya manusia; Penguatan IKM; Pengembangan IKM ; Perbaikan produksi.“**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis penguatan sumberdaya manusia; penguatan IKM; pengembangan IKM; perbaikan produksi, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis penguatan sumberdaya manusia; penguatan IKM; pengembangan IKM; perbaikan produksi; pada indikator kinerja jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri disebabkan adanya bantuan peralatan dan mesin, pendampingan manajemen, kualitas produk dan pemagangan pengolaham batu alam di Magelang dan pemagangan kerajinan daun silar di Tasikmalaya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.8**

Capaian Sasaran Strategis Penguatan sumberdaya Manusia; Penguatan IKM; Pengembangan IKM; Perbaikan produksi.

| No | Indikator Kinerja                             | Target  | Realisasi | % Capaian |
|----|---|---------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri | 22 Klpk | 22 Klpk   | 100%      |

**Sasaran 7 :**

**” Terwujudnya pengembangan usaha mikro “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis terwujudnya pengembangan usaha mikro, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis terwujudnya pengembangan usaha mikro pada indikator kinerja jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri disebabkan Pemerintah Kota Palu telah melakukan peningkatan dan pengembangan usaha mikro bagi pelaku usaha baru.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**

## Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Usaha Mikro

| No | Indikator Kinerja                               | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri | 102    | 102       | 100%      |

**Sasaran 8 :****” Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya, angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD sebesar 100% dan capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya pada indikator kinerja jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD disebabkan adanya pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar prosedur layanan pada 10 (sepuluh) OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Anutapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kta Palu.

Tercapainya Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

## Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Berbasis Budaya

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD | 10 OPD | 10 OPD    | 100%      |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat baik terhadap layanan OPD                              | 6 OPD  | 6 OPD     | 100%      |

**Sasaran 9 :**

**” Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif, angka capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil** dengan capaian indikator kinerja persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional sebesar 100% .

Tercapainya sasaran strategis terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsive pada indikator persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional disebabkan Pemerintah Kota Palu melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Pendamping Pembangunan Daerah Kota Palu telah melakukan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran di Tahun 2017.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut .

**Tabel 3.11**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Transparan, Akuntabel dan Responsif

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%    | 65%       | 100%      |

**Sasaran 10 :**

**” Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis **Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman** capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Pada capaian indikator kinerja **Jumlah lintasan trayek angkutan umum** dengan capaian sebesar 100%. Indikator kinerja **Ketersediaan Lokasi Lahan Parkir Yang Layak** dengan capaian 100,21%, dan Indikator Kinerja **Ketersediaan Pelayanan Terminal Kota** dengan capaian **100%**.

Tercapainya sasaran strategis terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman pada indikator kinerja **jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan**

disebabkan upaya Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan Kota Palu telah mewujudkan pelaksanaan trayek angkutan umum sebanyak 6 (enam) jaringan trayek sesuai dengan keputusan Wali Kota Palu Nomor 551.2/361/Dishub/2017 tentang jaringan trayek angkutan kota dan wilayah operasi angkutan serba guna serta tarif pelayanan angkutan dengan kendaraan umum dalam wilayah Kota Palu. Dalam keputusan Wali Kota ini menjelaskan mengenai jaringan trayek angkutan kota, wilayah operasi angkutan serba guna serta tarif pelayanan angkutan.

Tercapainya capaian sasaran strategis penataan transportasi yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja **Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak** disebabkan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Palu dalam mengupayakan potensi lahan atau titik parkir sebanyak 446 lahan/titik menjadi 447 titik/lahan. Olehnya untuk tahun berikutnya Dinas Perhubungan Kota Palu akan menargetkan sebanyak 468 titik/lahan, yang menjadi potensi dari titik/lahan parkir yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota palu dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Palu. Realisasi dari capaian indikator kinerja kedua ini mengacu pada Dinas Perhubungan Kota Palu mengenai lokasi lahan/titik parkir. Dengan rincian titik parkir tep jalan di Kecamatan Palu Selatan sebanyak 63 titik parkir, Kecamatan Palu Timur sebanyak 169 titik parkir, Kecamatan Palu Barat sebanyak 191 titik parkir, dan Kecamatan Palu Utara sebanyak 24 titik parkir.

Tercapainya sasaran strategis penataan transportasi yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja **Ketersediaan Pelayanan Terminal Kota**, disebabkan upaya Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penataan terminal kota guna meningkatkan pelayanan terminal di laksanakan pada dua terminal yaitu Terminal Mamboro dan Terminal Petobo dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terminal yang ada di Kota Palu.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.12**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan Transportasi yang Aman dan Nyaman

| No | Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan | 6      | 6         | 100%      |
| 2  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak          | 82,59% | 82,77%    | 100,21%   |
| 3  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota                 | 50%    | 50%       | 100%      |

**Sasaran 11 :**

**” Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. capain indikator kinerja Ketersediaan kawasan publikasi kota sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya**, pada Indikator Kinerja Jumlah **sculpture berbasis nilai budaya dan sejarah** disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun dekorasi kota dalam bentuk ornament yang bercirikan budaya yaitu Taman GOR. Ornament tersebut mencerminkan nilai Toleransi, nilai kekeluargaan dan nilai gotongroyong.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat dibawah ini :

**Tabel 3.13**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan Dekorasi Kota yang Tertib, Indah dan Memiliki Nilai Budaya

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah | 1      | 1         | 100%      |

**Sasaran 12 :**

**” Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil** dengan capaian indikator kinerja Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya**, pada Indikator Kinerja Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun 4 (empat) ruang publik yaitu Kawasan Kampung Kaili, Taman GOR, Hutan Kota dan Taman Vatulemo.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut. Dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Ruang Publik Kota yang Berbasis Nilai Budaya

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro | 4      | 4         | 100%      |

**Sasaran 13 :**

**” Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif “**

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif, angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**, capaian indikator kinerja Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif**, pada indikator kinerja Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah menerapkan Manajemen Kue Lapis dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

Tercapainya sasaran strategis **Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif**, pada indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membentuk Satgas K5 pada 46 Kelurahan di Kota Palu. Satgas K5 sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan di masing-masing Kelurahan dalam bentuk Gerakan Gali Gasa.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Kota yang Partisipatif

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase sampah yang terangkut   | 60%    | 56,02%    | 93,37%    |
| 2  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton | 15 ton    | 100%      |
| 3  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan | 15%    | 15%       | 100%      |

#### Sasaran 14:

##### ” Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan “

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dengan sasaran strategis Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan capaian kinerja sarasannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Dengan capaian Indikator Kinerja Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Panjang jalan yang terbangun (meter) capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja panjang drainase yang terbangun (meter) disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun Drainase jalan Kota sepanjang 42,476 meter. Indikator Kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan drainase jalan Kota. Indikator Kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik capaian kinerja 100 %, Indikator Kinerja persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Akses Sanitasi layak capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Cakupan layanan pengguna air bersih capaian kinerja 100%, Indikator kinerja Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan air bersih capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Persentase kawasan kumuh yang tertata capaian kinerja 100%, Indikator Kinerja Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) capaian kinerja 100%.

Tercapainya sasaran strategis **Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan** pada indikator kinerja Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun, meningkatkan dan rehabilitasi jalan Kota dan jalan lingkungan sepanjang 303.406 KM. Untuk Indikator Kinerja Panjang jalan yang terbangun (meter) disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membangun jalan Kota dan Jalan lingkungan sepanjang 303.406 meter. Indikator Kinerja persentase drainase kota dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan pemeliharaan drainase jalan Kota. Indikator Kinerja persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan pemeliharaan dan perawatan jembatan yang ada di Kota Palu. Indikator Kinerja Akses Sanitasi layak disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan sanitasi perkotaan (drainase, air limbah) pada lokasi Kawasan Lorong Bakso, Kelurahan Pantoloan Boya, dan Kelurahan Baiya. Indikator Kinerja Cakupan layanan pengguna air bersih disebabkan Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum telah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan Air Bersih dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Silae dan Kelurahan Buluri. Indikator Kinerja Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu

karang, hutan bakau) disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah melakukan Revitalisasi kawasan konsevasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) yang terletak di kelurahan Duyu, Kelurahan Tavanjuka Kelurahan Besusu Barat, dan Kelurahan Pantoloan Boya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.16**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pusat-pusat Wisata Berbasis Budaya dan Religi

| No | Indikator Kinerja  | Target   | Realisasi | % Capaian |
|----|--|----------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                   | 51,54%   | 59,60%    | 115%      |
| 2  | Panjang jalan yang terbangun (meter)                               | 234.784  | 303.406   | 129,23    |
| 3  | panjang drainase yang terbangun (meter)                            | 42.104   | 42.476    | 100,88%   |
| 4  | persentase drainase kota dalam kondisi baik                        | 43,86%   | 48,77     | 111,19    |
| 5  | persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                      | 100%     | 100%      | 100%      |
| 6  | Akses Sanitasi layak   | 61,14%   | 61,14%    | 100%      |
| 7  | Cakupan layanan pengguna air bersih                                | 79,27    | 81,55%    | 102,88%   |
| 8  | Persentase kawasan kumuh yang tertata                              | 17,61%   | 17,61%    | 100%      |
| 9  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) | 5 lokasi | 5 lokasi  | 100%      |

**Sasaran 15:**

**” Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial angka capaian kinerja sasarannya sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**. Capaian indikator Kinerja Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi Capaian indikator Kinerja sebesar 100%, capaian indikator kinerja persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi sebesar 100% dan Capaian Indikator Kinerja Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil**.



Tercapainya sasaran strategis Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator kinerja persentase lembaga adat berperan dan berfungsi disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah membentuk Lembaga Adat di 46 kelurahan se-Kota Palu yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Peradilan Adat Kaili, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 20017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili, dan dilakukan pengukuhan Lembaga Adat oleh Wali Kota Palu di 46 (empat puluh enam) kelurahan se-Kota Palu.

Tercapainya sasaran strategis peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi disebabkan :

- Terlaksananya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan social kemasyarakatan dengan mendorong peran pemberdayaan masyarakat
- Mendorong kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Tercapainya sasaran strategis peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi disebabkan :

- Melibatkan lembaga seni budaya dalam pergelaran budaya di Festival Pesona Palu Nomoni.
- Adanya bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga seni budaya berupa gimba, lalove, kakula,

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17**

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Nilai-nilai Toleransi, Kekeluargaan dan Kegotong-royongan dalam Menjaga Keserasian Sosial

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1  | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi             | 46     | 46        | 100%      |
| 2  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi   | 2      | 2         | 100%      |
| 3  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi | 17     | 17        | 100%      |

### 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Gambaran perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017, menunjukkan tidak adanya perbedaan nilai capaian target. Rata-rata nilai capaian target kinerja Tahun 2016 sebesar 100%, dan nilai capaian target kinerja Tahun 2017, rata-rata sebesar 100%. Artinya bahwa nilai capaian target kinerja Tahun 2016 di banding dengan nilai capaian target kinerja Tahun 2017 adalah sama, rincian perbandingan nilai capaian target kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 di uraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Realisasi Tahun 2016 | % Capaian Target 2016 | Realisasi Tahun 2017 | % Capaian Target 2017 |         |
|----|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS   | 0                    | 0%                    | 1                    | 100%                  |         |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu            | Jumlah dokumen data potensi SDM                                     | 0                    | 0%                    | 3 Dok                | 100%                  |         |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                        | 0                    | 0%                    | 4 Dok                | 100%                  |         |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun           | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                        | SD                   | 0,01                  | 0,04                 | 0,04                  | 85,71%  |
|    |  |   | SMP                  | 0,3                   | 0,01                 | 0,01                  | 196,86% |
|    |  | Angka Melek huruf   | 99,81                | 100%                  | 99,83 %              | 99,98%                |         |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya                  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama   | 0                    | 0%                    | 100 %                | 100%                  |         |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni      | 0                    | 0%                    | 100 %                | 100%                  |         |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya | 0                    | 0%                    | 100 %                | 100%                  |         |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat             | Angka usia harapan hidup  | 69,93 tahun          | 99,39                 | 69,93 tahun          | 98,94                 |         |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas                                | Baik                 | Baik                  | Baik                 | Baik                  |         |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit                              | Baik                 | Baik                  | Baik                 | Baik                  |         |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk  | 0,157                | 177,57                | 0,153                | 176,82                |         |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa                       | 100%                 | 100                   | 100%                 | 100                   |         |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif                                       | 100%                 | 112,20                | 100%                 | 109,53                |         |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Realisasi Tahun 2016 | % Capaian Target 2016 | Realisasi Tahun 2017 | % Capaian Target 2017 |
|----|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6  | 1. Penguatan sumber daya manusia.;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk              | 100%                  | 22 Klpk              | 100%                  |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 0                    | 0%                    | 102                  | 100%                  |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                      | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 7 OPD                | 100%                  | 10 OPD               | 100%                  |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD                | 100%                  | 6 OPD                | 100%                  |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif          | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 35%                  | 100%                  | 65%                  | 100%                  |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman  | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 0                    | 0%                    | 6 Trayek             | 100%                  |
|    |   | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 61,48%               | 100%                  | 82,77%               | 100,21%               |
|    |   | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 25%                  | 100%                  | 50%                  | 100%                  |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya               | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 0                    | 0%                    | 1                    | 100%                  |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya                                      | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 1                    | 100%                  | 4                    | 100%                  |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif                       | Persentase sampah yang terangkut   | 55%                  | 100%                  | 56,02%               | 93,37%                |
|    |   | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 12 Ton               | 100%                  | 15 ton               | 100%                  |
|    |   | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan     | 0                    | 0%                    | 15%                  | 100%                  |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan                                       | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                       | 44,81%               | 100%                  | 59,60%               | 115%                  |
|    |   | Panjang jalan yang terbangun   | 171.858 meter        | 100%                  | 303.406              | 129,23%               |
|    |   | Panjang drainase yang terbangun (meter)  | 14.160 meter         | 100%                  | 42.476               | 100,88%               |
|    |   | Persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 40,57 %              | 100%                  | 48,77%               | 111,19%               |
|    |   | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 100%                 | 100%                  | 100%                 | 100%                  |
|    |   | Akses sanitasi layak   | 61%                  | 100%                  | 61,14%               | 100%                  |
|    |   | Cakupan layanan  | 79,01%               | 100%                  | 81,55%               | 102,88%               |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Realisasi Tahun 2016 | % Capaian Target 2016 | Realisasi Tahun 2017 | % Capaian Target 2017 |
|----|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|    |  | pengguna air bersih  |                      |                       |                      |                       |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata                              | 0                    | 0%                    | 17,61%               | 100%                  |
|    |  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) | 5 Lokasi             | 100%                  | 5 lokasi             | 100%                  |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                     | 0                    | 0%                    | 46                   | 100%                  |
|    |  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi           | 0                    | 0%                    | 2                    | 100%                  |
|    |  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi         | 0                    | 0%                    | 17                   | 100%                  |

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

### 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target RPJMD Tahun 2017

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun 2017 rata-rata telah terealisasi 100 %, dengan rincian digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**

Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD 2016 – 2021

| No | Sasaran Startegis  | Indikator Kinerja   | Target RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017 | % Capaian target | Rumus   |   |
|----|--|---|-------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS | 1                       | 1                                | 100%             | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS |   |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu            | Jumlah dokumen data potensi SDM                                   | 3 Dok                   | 3 Dok                            | 100%             | Jumlah dokumen data potensi SDM                                   |   |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                      | 3 Dok                   | 4 Dok                            | 100%             | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                      |   |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun           | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                      | SD                      | 0,035                            | 0,04             | 85,71%  | Jumlah capaian Kinerja APS SD/MI se-Kota Palu dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kota Palu dikali 100 %     |
|    |  |   | SMP                     | 0,32                             | 0,01             | 196,86%   | Jumlah capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kota Palu dibagi Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kota Palu dikali 100 % |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017 | % Capaian target | Rumus   |
|----|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------|---|
|    |   | Angka Melek huruf   | 99,85%                  | 99,83 %                          | 99,98%           | Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun 2017 dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100 |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya   | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama   | 100%                    | 100 %                            | 100%             | Jumlah siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama dibagi jumlah siswa kelas 5 se-Kota Palu dikali 100%              |
|    |   | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni      | 100%                    | 100 %                            | 100%             | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni dibagi jumlah Sekolah Menengah Pertama                               |
|    |   | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya | 75 %                    | 100 %                            | 100%             | Jumlah sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya dibagi jumlah sekolah pendidikan dasar dikali 100%              |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat                                    | Angka usia harapan hidup  | 70,68 tahun             | 69,93 tahun                      | 98,94            | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur                    |
|    |   | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas                                | Baik                    | Baik                             | Baik             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25   |
|    |   | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit :                            | Baik                    | Baik                             | Baik             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) * 25   |
|    |   | Prevalensi balita gizi buruk  | 0,66                    | 0,153                            | 176,82           | (Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi) / (Jumlah Balita ditimbang) * 100  |
|    |   | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa                       | 100%                    | 100%                             | 100              | (Jumlah KLB yang ditangani) / (Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama) * 100                                     |
|    |   | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif                                       | 91,30                   | 100%                             | 109,53           | (Jumlah Kelurahan siaga yang aktif) dibagi (jumlah Kelurahan siaga) * 100   |
| 6  | 1. Penguatan sumber daya manusia.;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri                       | 22 Klpk                 | 22 Klpk                          | 100%             | Jumlah data kelompok IKM  |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri                     | 102                     | 102                              | 100%             | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri   |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017 | % Capaian target | Rumus  |
|----|--|--|-------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya             | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD                  | 10 OPD                           | 100%             | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD                  |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD                   | 6 OPD                            | 100%             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik terhadap layanan OPD                                   |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%                     | 65%                              | 100%             | Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikali 100 %                                       |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                               | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek                | 6 Trayek                         | 100%             | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan   |
|    |  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%                  | 82,77%                           | 100,21%          | Jumlah lokasi lahan parkir yang layak dibagi jumlah lahan parkir kota dikali 100%                  |
|    |  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%                     | 50%                              | 100%             | Jumlah terminal kota yang terkelola dibagi jumlah terminal kota                                    |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya      | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 1                       | 1                                | 100%             | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah  |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya                             | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 4                       | 4                                | 100%             | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro                           |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif              | Persentase sampah yang terangkut   | 60%                     | 56,02%                           | 93,37%           | Jumlah sampah yang terangkut dibagi jumlah sampah yang ada dikali 100 %                            |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton                  | 15 ton                           | 100%             | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan     | 15%                     | 15%                              | 100%             | Jumlah kelurahan yang menjaga kebersihan lingkungan dibagi jumlah kelurahan Kota Palu dikali 100 % |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017 | % Capaian target | Rumus  |
|----|--|--|-------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan  | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                   | 51,54%                  | 59,60%                           | 115%             | Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan Kota Palu dikali 100 %                                     |
|    |  | Panjang jalan yang terbangun (meter)                               | 234.784                 | 303.406                          | 129,23%          | Panjang jalan yang terbangun (meter)   |
|    |  | Panjang drainase yang terbangun (meter)                            | 42.104                  | 42.476                           | 100,88%          | Panjang drainase yang terbangun (meter)  |
|    |  | Persentase drainase kota dalam kondisi baik                        | 43,86%                  | 48,77%                           | 111,19%          | Panjang drainase terbangun dalam kondisi baik dibagi panjang drainase Kota Palu yang mesti terbangun dikali 100% |
|    |  | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                      | 100%                    | 100%                             | 100%             | Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan yang terbangun dikali 100%                             |
|    |  | Akses sanitasi layak   | 61,14%                  | 61,14%                           | 100%             | Akses sanitasi layak   |
|    |  | Cakupan layanan pengguna air bersih                                | 79,27                   | 81,55%                           | 102,88%          | Jumlah layanan pengguna air bersih dibagi jumlah penduduk dikali 100 %   |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata                              | 17,61%                  | 17,61%                           | 100%             | Jumlah kawasan kumuh yang tertata dibagi jumlah kawasan kumuh di Kota Palu                                       |
|    |  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) | 5 lokasi                | 5 lokasi                         | 100%             | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)   |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                     | 46                      | 46                               | 100%             | Jumlah lembaga adat yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga adat Kota Palu                             |
|    |  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi           | 2                       | 2                                | 100%             | Jumlah lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga keagamaan Kota Palu                   |
|    |  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi         | 17                      | 17                               | 100%             | Jumlah lembaga seni yang berperan dan berfungsi dibagi jumlah lembaga seni Kota Palu                             |

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

### **3.6 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta solusinya.**

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 sesuai target dalam RPJMD Tahun 2016-2021 rata-rata tercapai 100%. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak sesuai target RPJMD 2016-2021 yaitu:

1. Indikator kinerja angka usia harapan hidup yang hanya mencapai 69,93 tahun dari target 70,68 tahun. Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat (PHBS)
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap Lansia

Solusi:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat melalui program Gerakan Masyarakat (GERMAS) terintegrasi
  - b. Mengoptimalkan pembinaan lansia oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
2. Indikator kinerja angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar tingkat SD tidak tercapai disebabkan masih adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan dasar.

Solusinya Kepada Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi pemahaman masyarakat kurang mampu terhadap pentingnya pendidikan dasar.

3. Indikator kinerja persentase sampah yang terangkut yang hanya mencapai 56,02% dari target 60%. Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan :

- a. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah
- b. Belum optimalnya pengolahan timbulan sampah oleh masyarakat.

Solusi :

- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengolahan sampah melalui “Perang Melawan Sampah Palu Bebas Sampah”.
- b. Penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi (denda) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengolahan timbulan sampah.

### **3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2017 dengan realisasi anggaran Tahun 2017. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kota



Palu yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan Tahun 2017. Rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2017 dengan realisasi capaian target kinerja Tahun 2017 pada table berikut :

**Tabel 3.20**

**Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017 dengan Realisasi Capain Target Kinerja Tahun 2017**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | % Capaian target | Target Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi Anggaran 2017 (Rp) | Persentase (%) |       |
|----|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------|
| 1  | Tersedianya sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS | Jumlah sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS   | 1           | 1           | 100%             | 4.195.635.331             | 3.669.341.731                | 87,46          |       |
| 2  | Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya Kota Palu            | Jumlah dokumen data potensi SDM                                     | 3 Dok       | 3 Dok       | 100%             |                           |                              |                |       |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                        | 4 Dok       | 4 Dok       | 100%             |                           |                              |                |       |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun           | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                        | SD          | 0,35%       | 0,04             | 85,71%                    | 21.233.795.200               | 20.699.475.251 | 97,48 |
|    |  |   | SMP         | 0,32%       | 0,01             | 196,86%                   |                              |                |       |
|    |  | Angka Melek huruf   | 99,81%      | 99,83%      | 99,98%           |                           |                              |                |       |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan agama dan budaya                  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama   | 100%        | 100%        | 100%             | 44.825.182.200            | 44.259.851.700               | 98,74          |       |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni      | 100%        | 100%        | 100%             |                           |                              |                |       |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya | 100%        | 100%        | 100%             |                           |                              |                |       |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat             | Angka usia harapan hidup  | 70,68 tahun | 69,93 tahun | 98,94            | 23.311.049.913            | 22.608.804.483               | 96,99          |       |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas                                | Baik        | Baik        | Baik             |                           |                              |                |       |
|    |  | Indeks Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit                              | Baik        | Baik        | Baik             | 173.817.308.335           | 159.849.351.576              | 91,96          |       |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk  | 0,66        | 0,153       | 176,82           | 66.746.000                | 66.746.000                   | 100            |       |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa                       | 100%        | 100%        | 100%             | 913.685.900               | 911.843.500                  | 99,8           |       |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif                                       | 91,3        | 100%        | 109,53           | 1.243.347.500             | 1.242.397.500                | 99,92          |       |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target   | Realisasi | % Capaian target | Target Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi Anggaran 2017 (Rp) | Persentase (%) |
|----|--|--|----------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 6  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2.Penguatan IKM;3.Pengembangan IKM;4.Perbaikan produksi; | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk  | 22 Klpk   | 100%             | 715.355.500               | 639.475.900                  | 89,39          |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro   | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 102      | 102       | 100%             | 252.143.000               | 251.125.000                  | 99,6           |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                 | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD   | 10 OPD    | 100%             | 106.403.550               | 99.359.450                   | 93,38          |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD    | 6 OPD     | 100%             | 45.600.000                | 45.600.000                   | 100            |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif     | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%      | 65%       | 100%             | 2.356.689.000             | 2.294.047.012                | 97,34          |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                                   | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek | 6 Trayek  | 100%             | 129.688.000               | 129.688.000                  | 100            |
|    |  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%   | 82,77%    | 100%             | 835.095.000               | 822.368.500                  | 98,48          |
|    |  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%      | 50%       | 100%             | 123.935.000               | 117.772.000                  | 95,03          |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya          | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 1        | 1         | 100%             | 4.063.062.475             | 3.968.841.526                | 97,68          |
| 12 | Terwujudnya ruang publik kota yang berbasis nilai budaya                                 | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 4        | 4         | 100%             | 820.189.900               | 817.327.400                  | 99,65          |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan kota yang partisipatif                  | Persentase sampah yang terangkut   | 60%      | 60%       | 100%             | 9.893.928.059             | 8.792.928.455                | 88,87          |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton   | 15 ton    | 100%             |                           |                              |                |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan     | 15%      | 15%       | 100%             |                           |                              |                |

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target   | Realisasi | % Capaian target | Target Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi Anggaran 2017 (Rp) | Persentase (%) |
|----|---|--|----------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan   | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                   | 51,54%   | 59,60%    | 115%             | 143.637.781.218           | 138.471.119.149              | 96,4           |
|    |   | Panjang jalan yang terbangun (meter)                               | 234.784  | 303.406   | 129,23%          |                           |                              |                |
|    |   | Panjang drainase yang terbangun (meter)                            | 42.104   | 41.476    | 98,51%           |                           |                              |                |
|    |   | Persentase drainase kota dalam kondisi baik                        | 43,86%   | 48,77%    | 111,19%          |                           |                              |                |
|    |   | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                      | 100%     | 100%      | 100%             |                           |                              |                |
|    |   | Akses Sanitasi layak   | 61,14%   | 61,14%    | 100%             | 3.456.317.000             | 2.572.914.000                | 74,44          |
|    |   | Cakupan layanan pengguna air bersih                                | 79,27%   | 81,55%    | 102,88%          | 11.517.161.000            | 11.315.447.514               | 98,25          |
|    |   | Persentase kawasan kumuh yang tertata                              | 17,61%   | 17,61%    | 100%             | 3.320.681.000             | 2.726.272.300                | 82,1           |
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) | 5 lokasi | 5 lokasi  | 100%             | 444.028.900               | 440.939.600                  | 99,3           |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                     | 46       | 46        | 100%             | 3.161.368.800             | 3.098.868.800                | 98,02          |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi           | 2        | 2         | 100%             |                           |                              |                |
|    |   | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi         | 17       | 17        | 100%             | 211.645.000               | 153.145.000                  | 72,36          |

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

### 3.8 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2017

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;

3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan Rasionalitas, Realitas dan Proporsional;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.340.906.455.717,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.298.042.428.903,00 setelah perubahan sebesar Rp.1.340.906.455.717,20 (bertambah menjadi Rp.42.864.026.814,20).

2. Belanja :

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp.1.277.791.822.503,00, setelah perubahan menjadi Rp.1.342.484.148.799,58 (bertambah Rp.64.692.326.296,58).

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp.9.746.393.600,- setelah perubahan sebesar Rp. 32.544.874.571,38. (bertambah Rp. 22.798.480.971,38).

b. Pengeluaran

Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp.29.997.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.30.967.181.489. bertambah (Rp.970.181.489).

### 3.9 Pendapatan

Berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada tiga pendekatan yaitu rasional, realistis dan proporsional serta mendapat dukungan dari masyarakat. Pada Tahun 2017 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp.2.567.626.572.129,00. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 3.21**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2017  
Per 31 Desember 2017

| <b>URAIAN</b>                                | <b>TARGET 2017</b>          | <b>REALISASI</b>            | <b>%</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| <i>1</i>                                     | <i>2</i>                    | <i>3</i>                    | <i>4</i> |
| <b>PAD</b>                                   | 283.967.304.727             | 284.377.595.883             | 100,14   |
| <b>Perimbangan</b>                           | 941.175.118.602             | 928.017.146.208             | 98,60    |
| <b>Pendapatan<br/>Lain-lain yang<br/>Sah</b> | 115.764.032.388,20          | 88.364.310.748              | 76,33    |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.340.906.455.717,20</b> | <b>1.300.759.052.839,00</b> | 97,01    |

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2017

Tabel 3.17 menjelaskan bahwa PAD melebihi target dari Rp. 283.967.304.727 dan terealisasi sebesar Rp. 284.377.595.883 naik sebesar Rp. 410.291.156 atau mencapai 100,14 %. Kontribusi kenaikan PAD diperoleh dari pendapatan lain-lain BLUD sebesar Rp. 14.347.181.937.

Realisasi dana perimbangan Tahun 2017 sebesar Rp. 928.017.146.208 atau mencapai 98,60 % dari target yang direncanakan. Demikian halnya realisasi pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar Rp.88.364.310.748 turun sebesar Rp.27.399.721.640,20.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 21,86% dari total pendapatan Kota Palu di tahun 2017. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 71,34% dan sisanya sebesar 6,79% adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.

### 3.10 Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan pendekatan rasional, realistis dan proporsional untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan dalam RPJMD. Kebijakan belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam tabel 3.18.

**Tabel 3.22**

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2017

| No                   | Uraian           | TAHUN ANGGARAN 2017 SETELAH |                          |              |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
|                      |                  | Anggaran Belanja (Rp)       | Realisasi Belanja (Rp)   | %            |
| 1                    | Belanja Tidak    | 582.913.812.491,58          | 535.864.560.395          | 91,93        |
| 2                    | Belanja Langsung | 759.570.336.308             | 669.535.887.834          | 88,15        |
| <b>Total Belanja</b> |                  | <b>1.342.484.148.799,58</b> | <b>1.205.400.448.229</b> | <b>90,04</b> |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2017

Berdasarkan tabel 3.18 di atas menjelaskan bahwa belanja tahun 2017 sebesar Rp.1.342.484.148.799,58 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.582.913.812.491,58 (43,42%) dan belanja langsung sebesar Rp.759.570.336.308 (56,58%), sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.1.205.400.448.229 (91,93) yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 535.864.560.395 dan belanja langsung sebesar Rp.669.535.887.834 (88,15) dengan rata-rata belanja sebesar 90,04%.

### 3.11 Pembiayaan

Pembiayaan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2017 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Palu khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat.

Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Palu, maka komponen pembiayaan penggunaannya diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kota Palu yang telah jatuh tempo pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.19.

**Tabel 3.23**

Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2017

| No | Uraian                        | Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan |                   |       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|
|    |                               | Anggaran Belanja                      | Realisasi Belanja | %     |
| 1  | Penerimaan Pembiayaan Daerah  | 32.544.874.571,38                     | 32.536.677.560,38 | 99,97 |
| 2  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 30.967.181.489,00                     | 30.957.681.489,00 | 99,97 |

*Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2017*

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2017 yang ditargetkan sebesar Rp.32.544.874.571,38 terealisasi sebesar Rp.32.536.677.560,38 atau 99,97% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp.30.967.181.489,00 terealisasi sebesar Rp.30.957.681.489,00 atau 99,97%. Berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut sehingga didapatkan pembiayaan netto sebesar Rp. 1.578.996.071,38 atau 95,15%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian dari 15 (lima belas) sasaran strategis yang mencakup 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja, dikategorikan sangat berhasil. Selanjutnya, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 105,67 % atau bermakna sangat berhasil. Dengan demikian capaian kinerja Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Beberapa langkah antisipatif yang telah dan sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 merupakan bagian dari upaya mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis, sebagaimana yang telah dijanjikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan
5. Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;
6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;
7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan;
8. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik;
9. meningkatkan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya;
10. meningkatkan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu;
11. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu;



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2017, disusun untuk dijadikan bahan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Kota Palu ke depan. Dengan penyampaian laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja yang akan datang.

**LAMPIRAN**



# PEMERINTAH KOTA PALU INSPEKTORAT

Jalan Balai Kota Utara Nomor 1 A Telepon dan Fax : (0451) 425542

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk tahun anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR**

**DIDI BAKRAN, S.H, M.Si**

Pembina Tkt. I

NIP. 19700502 200012 1 004



# PEMERINTAH KOTA PALU INSPEKTORAT

Jalan Balai Kota Utara Nomor 1 A Telepon dan Fax : (0451) 425542

## FORMULIR CHECK LIST

|    | Pernyataan           | Check list  |
|----|----------------------|---|
| I  | Format               | <ul style="list-style-type: none"><li>1.Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP Ya</li><li>2.LKj telah menyajikan informasi target kinerja Ya</li><li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai Ya</li><li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan Ya</li><li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan Ya</li><li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan Ya</li></ul>   |
| II | Mekanisme penyusunan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu Ya</li><li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai Ya</li><li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj Tidak</li><li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja Tidak</li><li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya Ya</li><li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah Ya</li></ul> |

|     |           |  |    |
|-----|-----------|--|----|
|     |           | diketahui oleh unit kerja terkait  | Ya |
|     |           | 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.  | Ya |
| III | Substansi | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja                        | Ya |
|     |           | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis   | Ya |
|     |           | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  | Ya |
|     |           | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja                         | Ya |
|     |           | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama                   | Ya |
|     |           | 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                  | Ya |
|     |           | 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | Ya |
|     |           | 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran  | Ya |
|     |           | 10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai  | Ya |
|     |           | 11. IKU dan IK telah SMART   | Ya |



# PEMERINTAH KOTA PALU INSPEKTORAT

Jalan Balai Kota Utara Nomor 1 A Telepon dan Fax : (0451) 425542

---

Palu, 26 Maret 2017

Nomor : 706/1 -LHR/RHS/IB-I/ITKOT  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Kota Palu Tahun 2017

Dengan ini kami sampaikan laporan Hasil Reviu Atas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 dengan tolak ukur Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2016 – 2021, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen lain yang mendukung dengan hasil sebagai berikut :

## **A. Pernyataan Reviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, kami yakin bahwa Laporan Kinerja tersebut disajikan berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

## **B. Dasar Reviu**

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun anggaran 2017 ini berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang petunjuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Intansi Pemerintah;
4. Surat Perintah Walikota Palu Nomor: 700/0879/Itkot/2017 tanggal 20 Maret 2018

## **C. Tata Cara Reviu**

1. Pihak yang melaksanakan reviu

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Didi Bakran, SH., M.Si             | Penanggungjawab       |
| 2. Arifin Ombi, SE., M.Adm. Kp        | Wakil Penanggungjawab |
| 3. Nuraini Madokala, SH, M.Si         | Anggota               |
| 4. Fachrudin Mg. Abd. Karim, SP, M.Si | Anggota               |
| 5. Metty, SH                          | Anggota               |
| 6. Susik, SKM, M.Si                   | Anggota               |
| 7. Farida, S.Sos                      | Anggota               |

2. Waktu pelaksanaan reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan Tanggal 20 s/d 27 Maret 2018

## **D. Tujuan Reviu**

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

## **E. Ruang lingkup pelaksanaan Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Kesesuaian dengan Perencanaannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 - 2021, Perjanjian Kinerja Kota Palu Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, serta dokumen pendukung lainnya.

## **F. Simpulan dan Rekomendasi**

### **1. Simpulan**

Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta terdapat beberapa rekomendasi kami mengarah perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **a. Reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Laporan kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Wakil Wali Kota No. 050/76/BAPPEDA/2018 Tanggal 25 Januari 2017 dengan Leading Sektor Bappeda Kota Palu. Proses penyusunan laporan tersebut telah melalui proses mekanisme penyusunan yang memadai, namun masih terdapat kelemahan - kelemahan dalam pengendalian, kelemahan tersebut sebagai berikut :

- Mekanisme penyusunan dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja belum ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Belum ada Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang penunjukan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap satuan kerja terkait penyusunan Laporan Kinerja.
- Melakukan penguatan terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan sesuai revisi RPJMD Kota Palu.

#### **b. Reviu atas Laporan Kinerja**

Pada pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh pada Tim penyusunan Laporan Kinerja Kota Palu tahun 2017 telah menyajikan capaian indikator kinerja sasaran dalam pelaporan kinerja sesuai target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam



dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, sehingga format dan mekanisme penyusunan laporan kinerja sebagai berikut :

| <b>No</b> | <b>URAIAN</b> | <b>RPJMD<br/>2016 -<br/>2021</b> | <b>DOK.<br/>PERJANJIAN<br/>KINERJA 2017</b> | <b>LAPORAN<br/>KINERJA<br/>TAHUN 2017</b> |
|-----------|---------------|----------------------------------|---|---|
| <i>01</i> | <i>02</i>     | <i>03</i>                        | <i>04</i>                                   | <i>05</i>                                 |
| 1         | Visi          |                                  |   |   |
| 2         | Misi Satu     |                                  |   |   |
|           | Tujuan        | 3                                | 3   | 3   |
|           | Sasaran       | 3                                | 3   | 3   |
|           | Indikator     | 5                                | 5   | 5   |
| 3         | Misi Dua      |                                  |   |   |
|           | Tujuan        | 3                                | 3   | 3   |
|           | Sasaran       | 3                                | 3   | 3   |
|           | Indikator     | 12                               | 12  | 12  |
| 4         | Misi Tiga     |                                  |   |   |
|           | Tujuan        | 3                                | 3   | 3   |
|           | Sasaran       | 3                                | 3   | 3   |
|           | Indikator     | 4                                | 4   | 4   |
| 5         | Misi Empat    |                                  |   |   |
|           | Tujuan        | 4                                | 4   | 4   |
|           | Sasaran       | 4                                | 4   | 4   |
|           | Indikator     | 6                                | 6   | 6   |
| 6         | Misi Lima     |                                  |   |   |
|           | Tujuan        | 6                                | 6   | 6   |
|           | Sasaran       | 6                                | 6   | 6   |
|           | Indikator     | 21                               | 21  | 21  |
| 7         | Misi Enam     |                                  |   |   |
|           | Tujuan        | 2                                | 2   | 2   |
|           | Sasaran       | 1                                | 1   | 1   |
|           | Indikator     | 3                                | 3   | 3   |

Pada tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palu mempunyai 24 Tujuan, 24 Sasaran Strategis dan 169 Indikator Kinerja. Setelah revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 -2021 mempunyai 21 Tujuan, 20 Sasaran Strategis dan 51 Indikator Kinerja.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, direkomendasikan kepada Walikota Palu kirannya dapat memerintahkan kepada :

1. Kepala seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu untuk mereviu ketepatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) didalam mekanisme penyusunan dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar menetapkan keputusan tentang Penunjukan penanggungjawab pengumpulan data/informasi setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Penyusunan laporan Kinerja.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah mereviu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang terkait IKU dalam dokumen Penyusunan laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
4. Kepala Bappeda Kota Palu agar melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu secara berkala sesuai dengan Indikator Kinerja yang termuat dalam dokumen Revisi Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Demikian hasil reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSPEKTUR**



**DIDI BAKRAN, S.H, M.Si**

Pembina Tkt. I

NIP. 19700502 200012 1 004



PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 24/Bappeda/I/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA

PALU TAHUN 2017

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka pemerintah yang terpadu dan terarah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota Palu sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 Januari 2017

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA PALU

NOMOR 24/Bappeda/I/2017

## TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN

2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2017

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target  |
|----|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| 1  | Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS              | Jumlah sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                          | 1   |
| 2  | Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu                          | Jumlah dokumen data potensi SDM   | 3 Dok   |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS  | 4 Dok   |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun                         | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar  | SD<br>0,35 %<br>SMP<br>0,32 %                 |
|    |  | Angka Melek huruf   | 99,81 %                                       |
|    |  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama                           | 100 %   |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya                                | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni                              | 100 %   |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya                         | 100 %   |
|    |  | Angka usia harapan hidup  | 70,68 tahun                                   |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat                           | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas  | Baik  |
|    |  | Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit :  | Baik  |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk  | 0,66  |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa   | 100%  |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif   | 91,30   |
|    |  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro   | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri   | 102   |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya             | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD           | 10 OPD  |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD  | 6 OPD   |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional.      | 65%   |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                               | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan  | 6 Trayek                                      |
|    |  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak   | 82,59%  |
|    |  | Ketersediaan pelayanan  | 50%   |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target   |
|----|--|--|----------|
|    |  | terminal Kota  |          |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya                                  | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                          | 1        |
| 12 | Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya   | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro           | 4        |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif  | Persentase sampah yang terangkut   | 60%      |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton   |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan | 15%      |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan  | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                   | 51,54%   |
|    |  | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 234.784  |
|    |  | panjang drainase yang terbangun (meter)  | 42.104   |
|    |  | persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 43,86%   |
|    |  | persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                      | 100%     |
|    |  | Akses Sanitasi layak   | 61,14%   |
|    |  | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,27%   |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 17,61%   |
|    |  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                 | 5 lokasi |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                                     | 46       |
|    |  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi                           | 2        |
|    |  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi                         | 17       |

WALI KOTA PALU,

  
HIDAYAT



## WALI KOTA PALU

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, Januari 2017

**WALIKOTA PALU**

**Drs. HIDAYAT M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KOTA PALU**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target                        |
|----|---|--|-------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                             |
| 1  | Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                     | Jumlah sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                     | 1                             |
| 2  | Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu                                 | Jumlah dokumen data potensi SDM  | 3 Dok                         |
|    |   | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS   | 4 Dok                         |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun                                | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar   | SD<br>0,35 %<br>SMP<br>0,32 % |
|    |   | Angka Melek huruf  | 99,81 %                       |
|    |   |  |                               |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya                                       | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama                      | 100 %                         |
|    |   | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni                         | 100 %                         |
|    |   | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya                    | 100 %                         |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat                                  | Angka usia harapan hidup   | 70,68 tahun                   |
|    |   | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas   | Baik                          |
|    |   | Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit :   | Baik                          |
|    |   | Prevalensi balita gizi buruk   | 0,66                          |
|    |   | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa  | 100%                          |
|    |   | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif  | 91,30                         |
| 6  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk                       |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 102                           |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                    | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD                        |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD                         |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsive       | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%                           |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                                      | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek                      |
|    |   | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%                        |
|    |   | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%                           |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya             | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 1                             |

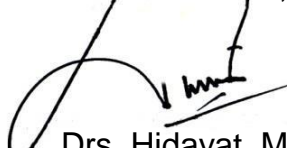


| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target   |
|----|--|--|----------|
| 12 | Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya   | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro           | 4        |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif  | Persentase sampah yang terangkut   | 60%      |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton   |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan | 15%      |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan  | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                   | 51,54%   |
|    |  | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 234.784  |
|    |  | panjang drainase yang terbangun (meter)  | 42.104   |
|    |  | persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 43,86%   |
|    |  | persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                      | 100%     |
|    |  | Akses Sanitasi layak   | 61,14%   |
|    |  | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,27%   |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 17,61%   |
|    |  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                 | 5 lokasi |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                                     | 46       |
|    |  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi                           | 2        |
|    |  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi                         | 17       |

**Program****Anggaran**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Prog. Study dan Penelitian   | Rp. 4.195.635.331  |
| 2. Prog. Pengembangan data/informasi/statistik daerah   | Rp. 85.663.000     |
| 3. Prog. Palu Kana Mapande  | Rp.44.825.182.200  |
| 4. Prog. Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun   | Rp.21.233.795.200  |
| 5. Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat   | Rp.23.311.049.913  |
| 6. Prog.Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat   | Rp. 1.243.347.500  |
| 7. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi  | Rp. 3.554.379.000  |
| 8. Pengembangan Industri kecil dan menengah   | Rp. 715.355.500    |
| 9. Pengembangan Sentra-sentra industry potensial  | Rp. 3.155.288.900  |
| 10. Perencanaan pembangunan daerah  | Rp. 2.356.689.000  |
| 11. Prog.Peningkatan pelayanan angkutan   | Rp. 1.819.047.700  |
| 12. Prog. Perencanaan Tata ruang  | Rp. 4.063.062.475  |
| 13. Prog. Pengembangan Kinerja Persampahan  | Rp. 9.893.928.000  |
| 14. Prog.Pengendalian perencanaan dan perusakan Lingkungan hidup  | Rp. 329.691.125    |
| 15. Prog. Pengelolaan ruang terbuka hijau   | Rp. 2.992.934.137  |
| 16. Prog.pembangunan jalan dan jembatan   | Rp. 62.886.332.217 |
| 17. Prog.Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong   | Rp.18.483.139.000  |
| 18. Prog.rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan   | Rp.61.268.310.000  |
| 19. Prog.pengembangan wily.strategis dan cepat tumbuh   | Rp. 2.852.005.000  |
| 20. Prog.pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya                      | Rp.16.742.712.000  |
| 21. Prog.peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan  | Rp. 3.161.368.800  |
| 22. Prog.pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya | Rp. 743.427.300    |

Palu, Januari 2017  
Wali Kota Palu,



Drs. Hidayat, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH PALU TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, Januari 2018

**WALIKOTA PALU**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hidayat', written over a horizontal line.

**Drs. HIDAYAT M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2018**

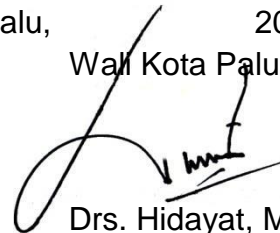
| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Target                    |
|----|--|--|---------------------------|
| 1  | Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                                | Jumlah sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS   | 1                         |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDM                                      | 3 Dokumen                 |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                         | 4 Dokumen                 |
| 2  | Tersedianya Jaringan pada semua OPD dan Kelurahan  | Persentase OPD dan Kelurahan terakses dengan pusat data              | 60%                       |
|    |  | Persentase OPD dan Kelurahan yang datanya terintegrasi di Pusat Data | 50%                       |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun   | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                         | SD<br>SMP<br>0,03<br>0,25 |
|    |  | Angka Melek huruf  | 99,90                     |
|    |  |  |                           |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama    | 100%                      |
|    |  | Persentase siswa kelas 7 yang mengikuti tambahan pendidikan agama    | 18%                       |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni       | 100%                      |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya  | 80%                       |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat   | Angka usia harapan hidup   | 70,84 Tahun               |
|    |  | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas                                 | Sangat Baik               |
|    |  | Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit                               | Sangat Baik               |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk   | 0,62                      |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa                        | 100%                      |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif  | 97,83                     |
| 6  | 1. Penguatan sumber daya manusia.<br>2. Penguatan IKM<br>3. Pengembangan IKM<br>4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri                        | 27 Klpk                   |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro   | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri                      | 152                       |
| 8  | Terwujudnya pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif  | Jumlah usaha ekonomi kreatif diintervensi menjadi mandiri            | 281                       |
| 9  | Terwujudnya Kelembagaan yang efisien dan efektif   | Jumlah dokumen analisis kelembagaan dan analisis jabatan             | 41 Dokumen                |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Target    |
|----|--|--|-----------|
| 10 | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya             | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya di setiap OPD     | 41 OPD    |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 11 OPD    |
| 11 | Terwujudnya Standar Kebutuhan dan Kompetensi ASN yang rasional                       | Jumlah OPD yang kebutuhan ASN sesuai dengan standar                                    | 6 OPD     |
|    |  | Jumlah OPD yang ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan                                  | 6 OPD     |
| 12 | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 75%       |
| 13 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                               | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6         |
|    |  | Jumlah Angkutan Umum melayani setiap lintasan trayek                                   | 29 Angkot |
|    |  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 86,67%    |
|    |  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 75%       |
| 14 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya      | Ketersediaan kawasan publikasi kota  | 3         |
|    |  | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 5         |
| 15 | Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya                             | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 10        |
| 16 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif              | Persentase sampah yang terangkut   | 65%       |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 18 ton    |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan     | 30%       |
| 17 | Terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya dan religi                            | Jumlah pusat wisata berbasis budaya dan religi   | 3         |
| 18 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan                              | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                       | 59,27%    |
|    |  | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 279.252   |
|    |  | panjang drainase yang terbangun (meter)  | 59.650    |
|    |  | persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 45,92%    |
|    |  | persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 100%      |
|    |  | Akses Sanitasi layak   | 62,23%    |
|    |  | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,58     |
|    |  | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan air bersih                          | 65,57%    |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 58,71%    |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama  | Target   |
|----|---|--|----------|
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) | 5 lokasi |
| 19 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                     | 46       |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi           | 2        |
|    |   | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi         | 27       |

Palu, 2018

Wali Kota Palu,

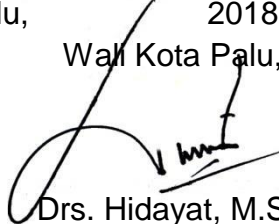


Drs. Hidayat, M.Si

| No. | Program  |    | Anggaran          |
|-----|--|----|-------------------|
| 1   | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                                 | Rp | 5.231.014.000     |
|     | Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah                                     | Rp | 1.144.622.500     |
| 3   | Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi  | Rp | 2.633.260.000     |
| 4   | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi                         | Rp | 34.410.000        |
| 5   | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah                                       | Rp | 2.001.000.000     |
| 6   | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK                             | Rp | 14.762.826.845,75 |
| 7   | Program Palu Kana Mapande  | Rp | 3.858.745.000     |
| 8   | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia   | Rp | 258.875.000       |
| 9   | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak                                    | Rp | 2.221.574.300     |
| 10  | Program Standarisasi Kesehatan   | Rp | 286.773.300       |
| 11  | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD  | Rp | 130.000.000.000   |
| 12  | Program Perbaikan Gizi Masyarakat  | Rp | 699.372.000       |
| 13  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                     | Rp | 706.335.250       |
| 14  | Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan   | Rp | 806.342.800       |
| 15  | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah   | Rp | 528.550.000       |
| 16  | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                                      | Rp | 1.084.745.000     |
| 17  | Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi  | Rp | 2.146.846.500     |
| 18  | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah          | Rp | 85.606.000        |
| 19  | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                | Rp | 363.277.500       |
| 20  | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                    | Rp | 25.850.000        |
| 21  | Program Pengembangan Aparatur Negara   | Rp | 1.719.103.500     |
| 21  | Program pengembangan data/informasi  | Rp | 324.340.000       |
| 22  | Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar                              | Rp | 115.264.000       |
| 23  | Program perencanaan pembangunan daerah   | Rp | 2.569.550.500     |
| 24  | Program peningkatan pelayanan angkutan   | Rp | 2.660.803.900     |
| 25  | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                                    | Rp | 1.501.324.950     |
| 26  | Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  | Rp | 3.512.880.258     |
| 27  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                       | Rp | 12.961.787.950    |
| 28  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Rp | 3.650.000.000     |
| 29  | Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh                                       | Rp | 18.888.207.400    |
| 30  | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan  | Rp | 202.122.000       |
| 31  | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan                                       | Rp | 17.040.243.170    |
| 32  | Program pembangunan jalan dan jembatan   | Rp | 75.354.757.160    |
| 33  | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong   | Rp | 10.458.025.000    |
| 34  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Rp | 9.597.515.000     |
| 35  | Program Lingkungan Sehat Perumahan   | Rp | 7.955.148.000     |
| 36  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                       | Rp | 213.312.000       |

| No. | Program   |    | Anggaran      |
|-----|---|----|---------------|
| 37  | Program pengembangan wawasan kebangsaan           | Rp | 2.409.128.000 |
| 38  | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Rp | 248.340.000   |

Palu, 2018  
Wali Kota Palu,



Drs. Hidayat, M.Si



## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

### PEMERINTAH KOTA PALU

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target                        |
|----|---|--|-------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                             |
| 1  | Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                     | Jumlah sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                     | 1                             |
| 2  | Tersedianya Data Dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu                                 | Jumlah dokumen data potensi SDM  | 3 Dok                         |
|    |   | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS   | 4 Dok                         |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun                                | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar   | SD<br>0,35 %<br>SMP<br>0,32 % |
|    |   | Angka Melek huruf  | 99,81 %                       |
|    |   |  |                               |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya                                       | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama                      | 100 %                         |
|    |   | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni                         | 100 %                         |
|    |   | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya                    | 100 %                         |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat                                  | Angka usia harapan hidup   | 70,68 tahun                   |
|    |   | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas   | Baik                          |
|    |   | Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit :   | Baik                          |
|    |   | Prevalensi balita gizi buruk   | 0,66                          |
|    |   | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa  | 100%                          |
|    |   | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif  | 91,30                         |
| 6  | 1.Penguatan sumber daya manusia;2. Penguatan IKM;3. Pengembangan IKM;4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri  | 22 Klpk                       |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro  | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri  | 102                           |
| 8  | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya                    | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya disetiap OPD      | 10 OPD                        |
|    |   | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 6 OPD                         |
| 9  | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsive       | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 65%                           |
| 10 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                                      | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6 Trayek                      |
|    |   | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 82,59%                        |

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target   |
|----|--|--|----------|
|    |  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 50%      |
| 11 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya                                  | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                          | 1        |
| 12 | Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya   | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro           | 4        |
| 13 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif  | Persentase sampah yang terangkut   | 60%      |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 15 ton   |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan | 15%      |
| 14 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan  | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                   | 51,54%   |
|    |  | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 234.784  |
|    |  | panjang drainase yang terbangun (meter)  | 42.104   |
|    |  | persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 43,86%   |
|    |  | persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                      | 100%     |
|    |  | Akses Sanitasi layak   | 61,14%   |
|    |  | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,27%   |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 17,61%   |
|    |  | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau)                 | 5 lokasi |
| 15 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                                     | 46       |
|    |  | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi                           | 2        |
|    |  | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi                         | 17       |

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

### PEMERINTAH KOTA PALU

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Target       |
|----|--|--|--------------|
| 1  | Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS                                | Jumlah sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS   | 1            |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDM                                      | 3 Dokumen    |
|    |  | Jumlah dokumen data potensi SDA berbasis GIS                         | 4 Dokumen    |
| 2  | Tersedianya Jaringan pada semua OPD dan Kelurahan  | Persentase OPD dan Kelurahan terakses dengan pusat data              | 60%          |
|    |  | Persentase OPD dan Kelurahan yang datanya terintegrasi di Pusat Data | 50%          |
| 3  | Terwujudnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar 9 Tahun   | Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar                         | SD<br>SMP    |
|    |  | Angka Melek huruf  | 0,03<br>0,25 |
|    |  |  | 99,90        |
| 4  | Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya  | Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama    | 100%         |
|    |  | Persentase siswa kelas 7 yang mengikuti tambahan pendidikan agama    | 18%          |
|    |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni       | 100%         |
|    |  | Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya  | 80%          |
| 5  | Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat   | Angka usia harapan hidup   | 70,84 Tahun  |
|    |  | Indeks pelayanan kesehatan puskesmas                                 | Sangat Baik  |
|    |  | Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit                               | Sangat Baik  |
|    |  | Prevalensi balita gizi buruk   | 0,62         |
|    |  | Persentase penanggulangan kejadian luar biasa                        | 100%         |
|    |  | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif  | 97,83        |
| 6  | 1. Penguatan sumber daya manusia.<br>2. Penguatan IKM<br>3. Pengembangan IKM<br>4. Perbaikan produksi. | Jumlah usaha IKM baru yang unggul dan mandiri                        | 27 Klpk      |
| 7  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro   | Jumlah usaha mikro diintervensi menjadi mandiri                      | 152          |
| 8  | Terwujudnya pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif  | Jumlah usaha ekonomi kreatif diintervensi menjadi mandiri            | 281          |
| 9  | Terwujudnya Kelembagaan yang efisien dan efektif   | Jumlah dokumen analisis kelembagaan dan analisis jabatan             | 41 Dokumen   |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Target    |
|----|--|--|-----------|
| 10 | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya             | Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria berbasis budaya di setiap OPD     | 41 OPD    |
|    |  | Indeks kepuasan masyarakat baik terhadap layanan OPD                                   | 11 OPD    |
| 11 | Terwujudnya Standar Kebutuhan dan Kompetensi ASN yang rasional                       | Jumlah OPD yang kebutuhan ASN sesuai dengan standar                                    | 6 OPD     |
|    |  | Jumlah OPD yang ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan                                  | 6 OPD     |
| 12 | Terwujudnya program, kegiatan, dan anggaran yang transparan, akuntabel dan responsif | Persentase program, kegiatan, dan anggaran yang rasional, realistis, dan proporsional. | 75%       |
| 13 | Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman                               | Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan                                   | 6         |
|    |  | Jumlah Angkutan Umum melayani setiap lintasan trayek                                   | 29 Angkot |
|    |  | Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak  | 86,67%    |
|    |  | Ketersediaan pelayanan terminal Kota   | 75%       |
| 14 | Terwujudnya penataan dekorasi kota yang tertib, indah dan memiliki nilai budaya      | Ketersediaan kawasan publikasi kota  | 3         |
|    |  | Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah                              | 5         |
| 15 | Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya                             | Jumlah ruang publik yang berfungsi sebagai ruang edukasi dan usaha mikro               | 10        |
| 16 | Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan keindahan Kota yang partisipatif              | Persentase sampah yang terangkut   | 65%       |
|    |  | Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat  | 18 ton    |
|    |  | Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan     | 30%       |
| 17 | Terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya dan religi                            | Jumlah pusat wisata berbasis budaya dan religi   | 3         |
| 18 | Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan                              | Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik                                       | 59,27%    |
|    |  | Panjang jalan yang terbangun (meter)   | 279.252   |
|    |  | panjang drainase yang terbangun (meter)  | 59.650    |
|    |  | persentase drainase kota dalam kondisi baik  | 45,92%    |
|    |  | persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 100%      |
|    |  | Akses Sanitasi layak   | 62,23%    |
|    |  | Cakupan layanan pengguna air bersih  | 79,58     |
|    |  | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan air bersih                          | 65,57%    |
|    |  | Persentase kawasan kumuh yang tertata  | 58,71%    |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama  | Target   |
|----|---|--|----------|
|    |   | Jumlah Daerah Konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau) | 5 lokasi |
| 19 | Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial | Persentase lembaga adat berperan dan berfungsi                     | 46       |
|    |   | Persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi           | 2        |
|    |   | Persentase lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi         | 27       |

## PIAGAM PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)



## ANUGERAH KOTA PEDULI HAM TAHUN 2017 DIBERIKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM



## PIAGAM ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2017



## SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA LULUS TINGKAT PARIPURNA



**PIAGAM PENGHARGAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SEBAGAI ROLE MODEL PENYELENGGARA PELAYANAN  
PUBLIK KATEGORI “BAIK DENGAN CATATAN”**



**PENGAHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN  
DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016  
DENGAN CAPAIAN STANDAR TERTINGGI OLEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**





## **SERTIFIKAT PENGHAARGAAN WALIKOTA INSPIRATOR OLEH KEMETERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**



**Walikota Palu, Drs. Hidayat, M.Si saat menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo sebagai Walikota Inspirator Pembangunan Daerah atas Integritas, Dedikasi & Inovatif dalam strategi jitu mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Palu dengan " Program Forum Pendampingan Pembangunan Kota Palu". Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati 21 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah kepada 21 Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.**

# PENGHAJARAN ANUGERAH PANDU NEGERI 2017 OLEH INDONESIAN INSTITUTE FOR PUBLIC GOVERNANCE

Walikota Palu, Drs. Hidayat M.Si  
Saat menerima Anugerah Pandu  
Negeri 2017, dimana Indonesian  
Institute for Public Governance  
memberikan Penghargaan Khusus  
kepada Kota Palu sebagai  
Pemerintah Daerah dengan Kinerja  
dan Tata Kelola Baik

